



KAPASITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN DI JAWA TENGAH

RURAL CAPACITY DEVELOPMENT IN CENTRAL JAVA

Arif Sofianto^{a*}, Tri Risandewi^a, Mursid Zuhri^a, Okki Chandra Ambarwati^a, Lita Febrina^a

^aBRIDA Provinsi Jawa Tengah

*Korespondensi: 01arifsofianto@gmail.com

Article Info:

- Artikel Masuk: 31 Maret 2023
- Artikel diterima: 27 Juni 2024
- Tersedia Online: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Pembangunan perdesaan saat ini telah diperkuat dengan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah, namun faktanya wilayah perdesaan masih menghadapi dilema kemiskinan dan ketertinggalan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas sumber daya, potensi, serta kebijakan pembangunan perdesaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan utama kuantitatif dan dilengkapi dengan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui formulir online yang disebar ke desa di Jawa Tengah dengan teknik area sampling. Data yang dikumpulkan berupa sumber daya pembangunan, manajemen dan tata kelola pembangunan, serta output pembangunan desa. Analisis data kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif dan data kualitatif dianalisis dengan model interaktif. Dengan mengacu pada komponen pembangunan desa manusia, alam, fisik dan finansial dari teori livelihood capital, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang tinggal di desa masih cukup rendah, sumber daya ekonomi unggulan belum dikelola dengan optimal, infrastruktur fisik menjadi perhatian utama pembangunan perdesaan, di pemberdayaan masyarakat masih rendah. Dari aspek finansial, desa mengalami ketergantungan tinggi terhadap dana pemerintah, dimana Pendapatan Asli Desa sangat kecil bahkan ada desa yang tidak memilikinya sehingga arah pembangunan menyesuaikan ketentuan sumber pendanaan tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini adalah desa memerlukan terobosan dan inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih baik, meningkatkan kualitas SDM dan kesempatan kerja yang lebih menarik di desa, mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak serta mengubah mindset alokasi anggaran pembangunan desa ke arah pemberdayaan, peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki skema pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Desa, Jawa Tengah, Kapasitas Pembangunan, Sumber Daya

ABSTRACT

Currently, rural development has been strengthened by various policies from the central and regional governments, but rural areas still face the dilemma of poverty and underdevelopment. This article analyzes the resource capacity, potential, and rural development policies in Central Java Province. This research is exploratory research with a quantitative main approach and is complemented by qualitative. Primary data was collected through online forms distributed to villages in Central Java using area sampling techniques. The data collected is in the form of development resources, development management, and governance, as well as village development output. Quantitative data analysis uses descriptive statistical techniques and qualitative data is analyzed using an interactive model. This research has referred to the human, natural, physical, and financial components of village development from livelihood capital theory. The research results show that the capacity of human resources living in villages is still quite low, superior economic resources have not been managed optimally, physical infrastructure is the main concern for rural development, and community empowerment is still low. From a financial aspect, villages experience high dependence on government funds, where Village Original Income is very small and there are even villages that do not have it. Hence, the direction of development adjusts to the provisions of this funding source. The recommendation from this research is that villages need breakthroughs and innovations in development and community empowerment to be able to manage natural resources better, improve the quality of human resources and make job opportunities more attractive in the village, develop networks and partnerships with various parties and change the mindset of development budget allocation. Villages towards empowerment, increasing human resource capacity and productivity. Apart from that, the central and regional governments need to improve village financial management schemes.

Keywords: Central Java, Development Capacity, Resources, Rural

1. PENDAHULUAN

Ciri utama desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal, tanah asal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, maka suatu desa ditandai oleh keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterikatan ini selain untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka (Rustiadi & Pranoto, 2007). Dari aspek historis dan politis, desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara-bangsa modern Indonesia terbentuk (Santoso, 2006).

Pembangunan desa dapat dilihat melalui konsep *livelihood* (keberlanjutan hidup), yang menjelaskan bagaimana desa dapat mengembangkan strategi untuk memperoleh dan mempertahankan mata pencaharian yang berkelanjutan. Konsep ini berfokus pada lima jenis modal utama yang menjadi sumber daya penting yaitu modal manusia (keterampilan, pengetahuan, kesehatan), modal sosial (jaringan, hubungan, norma), modal fisik (infrastruktur, peralatan), modal finansial (pendapatan, aset), dan modal alam (sumber daya alam) (Scoones, 1998). Menurut Scoones, keberlanjutan mata pencaharian ditentukan oleh kemampuan untuk mengakses, mengkombinasikan, dan memanfaatkan modal-modal ini secara efektif dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada di lingkungan sekitarnya. Konsep ini menekankan pentingnya memahami konteks lokal dan dinamika yang mempengaruhi akses dan kontrol atas berbagai sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan komunitas.

Desa memiliki sumber daya alam yang lebih banyak dibanding perkotaan dan menjadi sumber utama penghidupan masyarakatnya, namun ada situasi problematik di desa, yaitu kemiskinan dan pengetahuan yang rendah menyebabkan pemanfaatan yang kelewat batas atas sumber daya alam untuk bertahan hidup (Daldjoeni & Suyitno, 2004). Fenomena kemiskinan dan pengetahuan yang rendah menyebabkan eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, dimana terjadi karena masyarakat desa tergantung pada sumber daya alam (Purnomo et al., 2011). Di sisi lain ada sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal karena masih terbelakangnya masyarakat tersebut, kekurangan modal, sehingga tingkat produktivitas rendah dan berimplikasi terhadap tingkat pendapatan yang rendah (Rustiadi et al., 2009). Padahal, potensi sumber daya daerah perdesaan yang mencakup komponen alam, manusia, material, teknis, keuangan, dan infrastruktur, memainkan peran penting dalam transformasi dan pembangunannya (Pivovar & Pivovar, 2023).

Keterbelakangan perdesaan juga dapat terjadi ketika terlalu terspesialisasi pada satu komoditas pertanian atau sumber daya alam di sisi lain terdapat situasi lemahnya modal dan teknologi, serta Sumber Daya Manusia (SDM). Sebaliknya peluang pekerjaan yang sempit di perdesaan mendorong tenaga berkualitas menuju kota, dan semakin membuat desa tertinggal (Rustiadi et al., 2009). Hal ini sesuai dengan pernyataan Jamaludin (2017) bahwa faktor pendorong urbanisasi masyarakat desa ke kota karena kecenderungan orang desa menganggap sulit mendapatkan pekerjaan di desa. Situasi ketimpangan perkotaan dan perdesaan ini dapat menjadi perangkap kemiskinan di perdesaan, dimana digambarkan oleh Nurkse dalam Rustiadi et al (2009) sebagai "The Vicious Circles" (lingkaran setan/perangkap kemiskinan), dimana sumber daya alam belum dikembangkan secara optimal karena masih terbelakangnya masyarakat, dan kekurangan modal, sehingga produktivitas sangat rendah berdampak pada pendapatan yang rendah. Masalah lain yang dihadapi sebagian desa adalah minimnya sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang belum memadai, serta kemiskinan, di sisi lain investasi yang dilakukan di wilayah perdesaan sangat terbatas karena secara ekonomi tidak efisien dan terdapat kecenderungan fasilitas-fasilitas umum hanya terkonsentrasi di pusat-pusat administrasi wilayah lokal (Mali et al., 2019). Seharusnya desa dapat dikembangkan sehingga desa dan kota terutama ibu kota kecamatan bisa saling kolaborasi, desa sebagai penyedia bahan baku yang dipasarkan di kota, dan kota terutama ibu kota kecamatan sebagai titik tumbuh sebagai pusat pemasaran produk perdesaan, termasuk maraknya tumbuh sektor informal (Bintarto, 1984).

Kapasitas pengembangan wilayah perdesaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendidikan, pendapatan, lama tinggal, partisipasi dalam organisasi berbasis masyarakat, dan dukungan

infrastruktur (Jang & Park, 2022; Shtuler & Serzhanov, 2022). Menurut Kolopaking (dalam Purnomo et al., 2011) kapasitas desa digerakkan oleh tiga aras kerja yang saling terkait. Pertama, aras individu yang meliputi kemahiran dan kualifikasi individu menyokong kinerja desa. Kedua, aras kelembagaan atau organisasi yang meliputi kejelasan proses dan budaya kerja. Ketiga, aras sistem yang diarahkan untuk dapat menetapkan pembatasan dan kerangka penguatan beragam unsur dalam meningkatkan mutu desa. Untuk penguatan ketiga aras tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah pertama, peningkatan kepekaan terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kedua, mendistribusikan aset desa untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Ketiga, penguatan pemerintah desa dan merumuskan mengatur kehidupan desa beserta semua asetnya yang bersandar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Disisi lain, posisi desa sesuai Undang-Undang Nomor 32/ 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 6/ 2014 adalah “*pseudo government unit*” dibawah administrasi pemerintah kabupaten/kota, bukan instansi vertikal juga bukan *local self government* atau *local state government* serta juga bukan *nongovernment organizations* karena statusnya adalah organisasi subordinat pemerintah. Desa juga bukan *community* karena kewenangan, struktur organisasi, fungsi dan tugas, mekanisme kerjanya diatur, dan menyelenggarakan urusan pemerintah atasan, namun tidak mampu memberdayakan rakyat (Nurcholis, 2014).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, di Indonesia terdapat 83.994 desa/kelurahan yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jawa Tengah memiliki 8.562 desa/kelurahan yang tersebar di 576 kecamatan di 35 kabupaten/kota. Jumlah desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jumlah desa di Jawa Tengah adalah 7.809 desa tersebar di 29 kabupaten di Jawa Tengah. Sebagai wilayah yang memiliki wilayah perdesaan yang begitu luas, pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian penting. Selain pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan dukungan nyata pada pembangunan desa.

Ketersediaan investasi negara dan regional sangat penting untuk mendukung daerah perdesaan di tengah perubahan ekonomi dan lingkungan yang cepat, dengan perhatian khusus pada proses demografi, norma hukum, dan infrastruktur (Shtuler & Serzhanov, 2022). Sejak tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dana bantuan keuangan untuk pembangunan desa antara 50 – 100 juta rupiah. Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp689.349.799.000,- untuk 18.763 titik kegiatan. Pada tahun 2019 dana meningkat menjadi Rp1.170.245.310.000,- di 22.725 titik kegiatan, pada tahun 2020 dana yang dialokasikan sebesar Rp1.001.629.920.000,- untuk 16.773 titik kegiatan. Pada tahun 2021 alokasi meningkat menjadi Rp1.141.498.495.000,- untuk 18.112 kegiatan. Selain dana dari pemerintah provinsi, pemerintah desa juga mendapatkan dana pembangunan dari pemerintah pusat berupa Dana Desa. Pada tahun 2022, tercatat dana desa yang dialokasikan untuk 7.809 desa di Jawa Tengah sebanyak Rp8.116.178,993.000,-. Alokasi dana yang besar baik dari pemerintah pusat maupun provinsi diharapkan mampu memacu pembangunan desa di Jawa Tengah.

Pembangunan desa di Jawa Tengah terus tumbuh dan mengalami perbaikan di beberapa aspek. Pada tahun 2019 berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) tercatat ada 15 desa sangat tertinggal dan 603 desa tertinggal, kemudian menurun menjadi 2 desa sangat tertinggal dan 262 desa tertinggal di tahun 2020. Di tahun 2021 sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal, dan hanya ada 146 desa tertinggal. Desa berkembang di tahun 2020 sebesar 5.565 dan berkurang menjadi 5.169 di tahun 2021 karena beralih status menjadi desa maju. Sementara desa maju meningkat dari 1.840 di tahun 2020 menjadi 2.295 di tahun 2021, dan desa mandiri dari 140 desa di tahun 2020 menjadi 199 desa di tahun 2021. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan status pembangunan desa - desa di Jawa Tengah secara umum.

Pembangunan perdesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama membentuk dan merubah perilaku masyarakat (Sahyana, 2019). Pembangunan desa juga

merupakan proses merespon tiga lingkungan desa (alam, budaya dan sosial ekonomi) dengan cara yang tepat, dengan memperhatikan pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan baik secara wilayah maupun antar sektor (Suharyanto & Sofianto, 2012). Tujuan pembangunan desa adalah mendorong terwujudnya kemandirian desa melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dilakukan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggungjawab, mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin, mengembangkan potensi ekonomi unggulan desa yang disesuaikan dengan karakteristik desa.

Berdasarkan aspek atau sasarannya, pembangunan desa selama ini lebih identik dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik. Penelitian Tajuddin et al. (2020) menunjukkan bahwa fungsi kinerja pemerintah desa paling baik pada pembangunan infrastruktur, kemudian diikuti pemerataan, konsistensi, serta yang paling rendah adalah pada aspek transparansi. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Kusnendar (2018) menemukan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik masih kurang, seperti masih belum adanya inovasi pelayanan, masih ada beberapa kebutuhan masyarakat yang sulit untuk dikenali oleh pemerintah desa.

Dengan demikian, selain infrastruktur, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah fasilitasi ekonomi masyarakat, dalam hal ini sektor pertanian dalam arti luas dan industri mikro dan kecil (*home industry*) di perdesaan. Penelitian Soka et al. (2012) menunjukkan bahwa sektor *home industry* yang banyak terdapat di desa, selama ini menghadapi persoalan rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah yang tidak mendukung, oleh karena itu mereka membutuhkan akses permodalan, prasarana penunjang, pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses teknologi serta iklim bisnis yang lebih kondusif. Pengelolaan sumber daya desa yang tepat (alam, sosial, kelembagaan) merupakan salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut.

Aspek lainnya yang perlu disentuh dalam pembangunan desa adalah sumber daya manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Daldjoeni & Suyitno (2004) bahwa ada situasi problematik salah satunya pengetahuan yang rendah menyebabkan pemanfaatan yang kelewat batas atas sumber daya alam untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM desa menjadi sangat penting. Disisi lain banyak SDM desa yang berpotensi memilih ke luar desa karena di desa tidak tersedia lapangan pekerjaan yang diinginkan. Oleh sebab itu perlu ada formula pembangunan desa yang mampu meningkatkan kapasitas SDM sekaligus menyediakan ruang untuk berkreasi.

Hal lain yang menjadi penting sistem perencanaan desa yang perlu diubah selama ini belum berangkat dari potensi, masalah dan kebutuhan wilayah desa termasuk kelompok-kelompok masyarakat potensial yang ada di desa, begitu juga alokasi anggaran pembangunan. Berbagai program kerja yang dituangkan dalam perencanaan desa memiliki pola yang hampir sama yakni pembangunan fisik dan nonfisik (Sani & Mursak, 2018). Di banyak desa, alokasi anggaran pembangunan desa cenderung lebih banyak untuk infrastruktur dibanding peningkatan perekonomian atau pemberdayaan masyarakat. Sebuah penelitian di Kabupaten Pulau Morotai terhadap program Satu Desa Satu Milyar (SDSM) hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan rumah ibadah (Masjid dan Gereja), kantor desa, pagar desa dan jalan desa, disisi lain tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat terutama dari aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi (Usman & Habib, 2016). Sebaliknya banyak juga desa yang mengalokasikan untuk belanja investasi yaitu melalui BUMDes, namun tidak berjalan dengan mulus bahkan stagnan, terutama BUMDes yang berbentuk simpan pinjam, bahkan sebagian program hanya dapat menyentuh kalangan tertentu saja (Sani & Mursak, 2018). Penelitian lainnya dilakukan oleh Sulasdiono & Kartika (2021) pada 3 daerah di Jawa Tengah yaitu penggunaan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal menemukan adanya anggapan bahwa Dana Desa dipandang sebagai anggaran utama untuk pembangunan fisik, serta adanya intervensi kebijakan kepala daerah dalam mengatur dana desa. Sebagai contoh instruksi Bupati Kendal dimana 95,1% untuk pembangunan infrastruktur dan 4,9%

membentuk lembaga desa (pembangunan PAUD), di Kabupaten Semarang diarahkan untuk pembangunan fisik, sedangkan di Kabupaten Demak digunakan untuk ASN dan masyarakat sesuai dengan instruksi kepala daerah. Agar pemanfaatan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat hendaknya diputuskan melalui musyawarah untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan skala prioritas, serta pengawasan terhadap kesesuaian penggunaannya (Sulasdiono & Kartika, 2021)

Pemerintah desa perlu mengedepankan pendekatan kerjasama pemerintah-masyarakat agar peran masyarakat dalam pembangunan menjadi optimal, di sisi lain tantangannya adalah masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan (Prasojo & Fauziah, 2015). Diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, terutama kelompok rentan seperti orang miskin dan kaum perempuan dalam setiap tahapan kegiatan, penyediaan fasilitas dan pembinaan masyarakat (Dahlan et al., 2012).

Oleh karena itu, pemerintah desa menghadapi tantangan mensinergikan potensi sumber daya dan peran antar aktor dalam pengelolaan sumber daya dalam pembangunan untuk mewujudkan desa sejahtera. Kemandirian desa sendiri dapat dikelompokkan menurut aspek administratif pemerintahan meliputi struktur dan komposisi APBDesa, pendapatan desa, aset dan usaha desa; kemandirian ekonomi berupa kemampuan ekonomi masyarakat dalam pembangunan atau keswadayaan; dan kemandirian politik dilihat dari proses perwujudan hak-hak politik/partisipasi masyarakat, pembuatan kebijakan, kebebasan berekspresi (Suharto, 2012). Kepala desa berperan dalam pembinaan perangkat desa dan masyarakatnya untuk pemanfaatan kondisi perekonomian yang ada (Marsidi, 2017). Di satu sisi, perangkat desa juga harus mampu bergerak berubah secara dinamis, lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat (Lanak, 2021). Dengan demikian, secara umum kinerja pembangunan desa didukung oleh kapasitas respon pemerintah desa terhadap aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas pemerintah desa (Rosalina, 2013).

Di sisi lain, dari aspek kesejahteraan dan kualitas hidup, masyarakat desa masih menghadapi masalah klasik yaitu kemiskinan. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah (2022) tercatat persentase penduduk miskin perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 9,92 persen (1,81 juta orang), adapun di perdesaan sebesar 12,04 persen (2,013 juta orang). Angka tersebut naik di September 2022 menjadi 10,02 persen (1,85 juta orang) di perkotaan dan 12,05 persen (2,006 juta orang) di perdesaan. Selain persentase dan jumlah yang lebih besar, kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan perkotaan sebesar 1,640, sedangkan di perdesaan mencapai 1,879, dan Indeks Keparahakan Kemiskinan perkotaan sebesar 0,407, sedangkan di perdesaan sebesar 0,439.

Melihat data tersebut, meskipun upaya pembangunan perdesaan di Jawa Tengah telah diperkuat, namun wilayah perdesaan masih menghadapi dilema kemiskinan dan ketertinggalan. Disisi lain sudah diberikan berbagai fasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh sebab itu perlu dilakukan telaah tentang pola tata kelola pembangunan perdesaan di Jawa Tengah baik dalam alokasi sumber daya pembangunan, maupun pengelolaan potensi desa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang kapasitas sumber daya (manusia, ekonomi, infrastruktur, finansial), serta kebijakan pembangunan perdesaan terutama dalam alokasi sumber daya pembangunan untuk pembangunan perdesaan di Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis dengan mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai pembangunan perdesaan dan kapasitas desa di dalam melaksanakan pembangunan dari aspek sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan finansial. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis dengan adanya masukan bagi pemangku kebijakan dan praktisi pembangunan perdesaan untuk menyusun ataupun merancang program yang lebih efektif untuk kemandirian desa.

2. DATA DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan utama kuantitatif dilengkapi dengan kualitatif. Populasi penelitian ini ialah seluruh desa di Jawa Tengah sejumlah 7.809 desa. Adapun sampel yang diambil minimal sebanyak 263, hal ini sesuai dengan pedoman pada tabel Isaac dan Michael (Sugiyono, 2013) bahwa untuk populasi sekitar 8.000 ribu dengan tingkat kepercayaan 10% dibutuhkan minimal 263 sampel. Sampel ditentukan berdasarkan teknik area sampling yaitu berdasarkan karakteristik wilayah yang memiliki potensi-potensi unggulan yang dapat dikembangkan untuk menumbuhkan kawasan perdesaan. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan keterwakilan wilayah, yaitu wilayah pantai selatan, pantai utara, tengah, serta wilayah barat dan timur. Selain keterwakilan wilayah, pemilihan lokasi juga mempertimbangkan karakteristik wilayah baik dataran rendah, perbukitan, maupun pegunungan. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data terkait dengan sumber daya pembangunan, manajemen, tata kelola pembangunan dan *output* pembangunan desa. Adapun data sekunder bersumber dari dokumen terkait kondisi desa, potensi desa, dan alokasi sumber daya desa untuk pembangunan, kebijakan dan regulasi, pelaporan, maupun data statistik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa profil desa secara geografis, demografis, dan infrastruktur. Data lainnya ialah potensi sumber daya ekonomi dan kelembagaan ekonomi desa. Terakhir adalah data terkait dengan kapasitas anggaran dan belanja pemerintah desa.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dengan instrumen kuesioner melalui formulir *online* dan responden adalah kepala desa/perangkat desa mewakili desa mereka. Tahapan pengambilan data dalam penelitian ini yaitu: pemetaan awal/*screening* untuk memperoleh gambaran lokasi penelitian, penentuan area dan penentuan sampel di suatu area secara acak, dan konfirmasi data.

Analisis data survei diolah dengan analisis kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif yang mencakup teknik rerata, persentase, dan perbandingan antar unsur pembangunan. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjelaskan kondisi desa, potensi desa, dan alokasi sumber daya desa untuk pembangunan. Adapun untuk data sekunder dari berbagai sumber dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dari Miles & Huberman (2009), yaitu upaya yang berlanjut, berulang dan menerus antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling terkait.

Penelitian ini melibatkan 298 desa sebagai sampel, yang tersebar di 20 kabupaten di Jawa Tengah. Responden yang terlibat dalam penelitian ini ialah para kepala desa atau pejabat pemerintah desa mewakili desa masing-masing sampel tersebut serta masyarakat sebanyak 1.829 orang. Berdasarkan kewilayahan, desa sampel dapat diklasifikasikan menjadi desa di kawasan pantai utara, kawasan tengah, dan pantai selatan. Sebanyak 110 desa atau 36,91 persen berada di kawasan pantai utara, kemudian 114 desa atau 38,26 persen berada di kawasan tengah, dan 74 desa atau 24,83 persen berada di kawasan pantai selatan. Gambar 1 menunjukkan sebaran desa sampel penelitian ini.

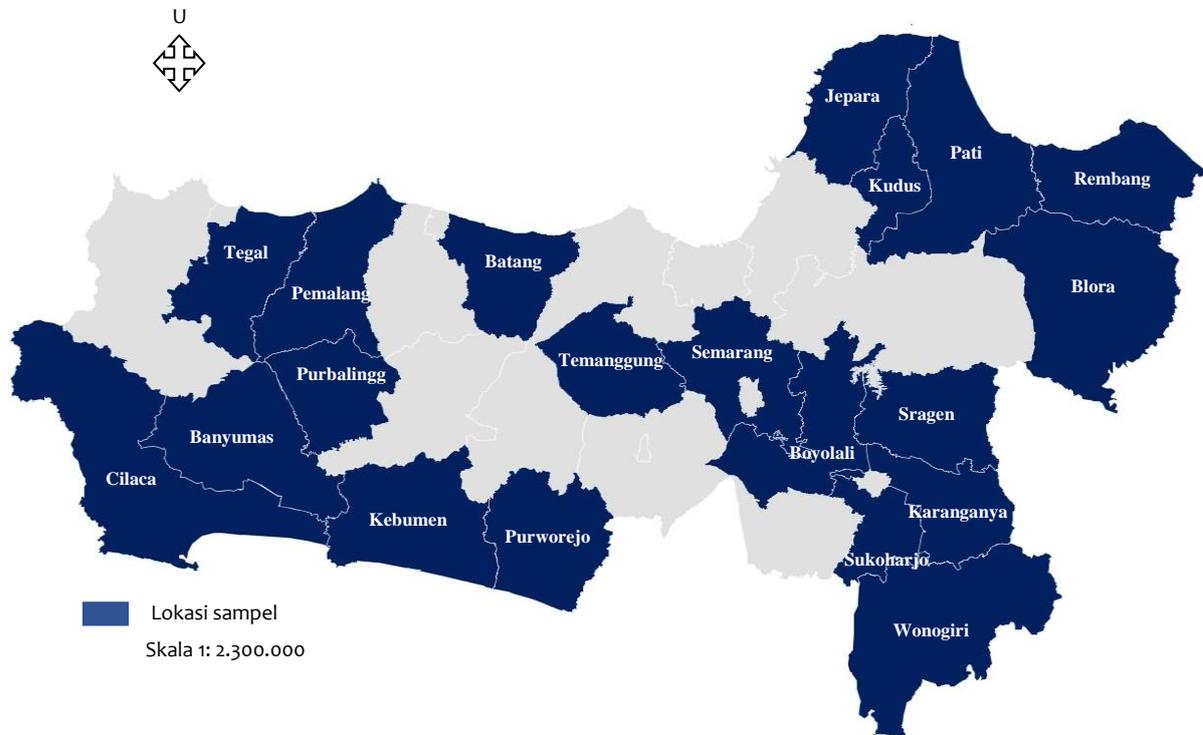
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

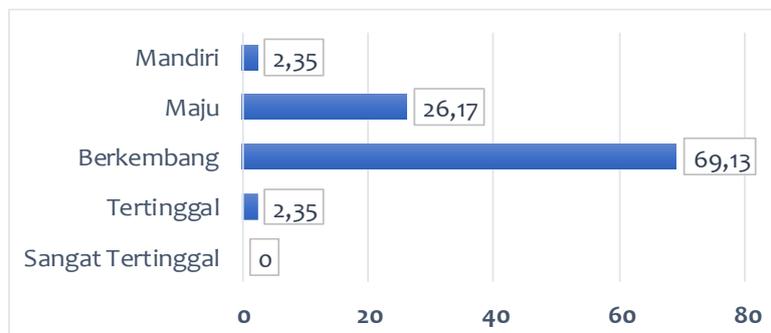
Sebagian besar desa sampel penelitian berstatus desa berkembang sebanyak 206 desa (68,98%) jika diukur berdasarkan indikator desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2. Indeks Desa Membangun memuat aspek sosial, ekonomi, dan ekologi sebagai kemampuan desa mensejahterakan rakyatnya. Indeks ketahanan sosial terdiri dari pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman. Adapun Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, serta keterbukaan wilayah. Terakhir adalah Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan terdiri dari kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana.

Kategori Desa Berkembang bermakna bahwa belum semua potensi dioptimalkan untuk kemanfaatan pembangunan. Adapun desa maju sudah dalam level mampu mengelola potensi untuk meningkatkan

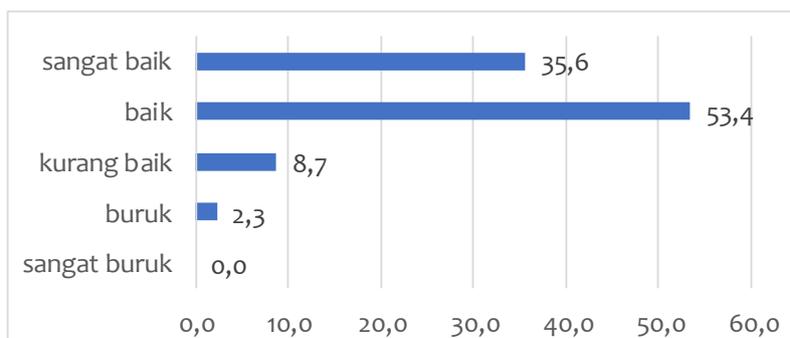
kesejahteraan masyarakat meskipun belum mencapai level kemandirian. Sedangkan desa tertinggal masih kesulitan dalam mengelola potensinya. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya upaya optimalisasi potensi desa.



Gambar 1. Peta Lokasi Sampel Penelitian



Gambar 2. Status Pembangunan Desa Sampel Penelitian (%)

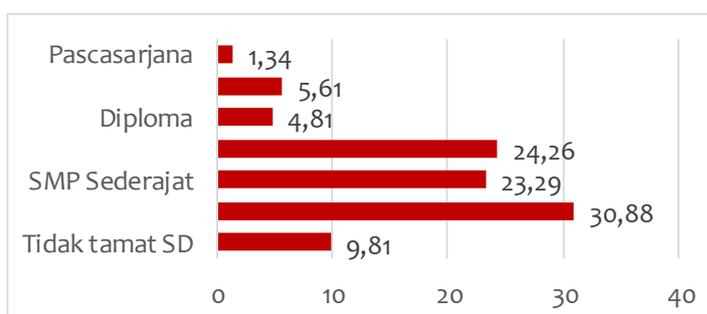


Gambar 3. Kondisi Infrastruktur dan Fasilitas Publik di Desa Sampel Penelitian (%)

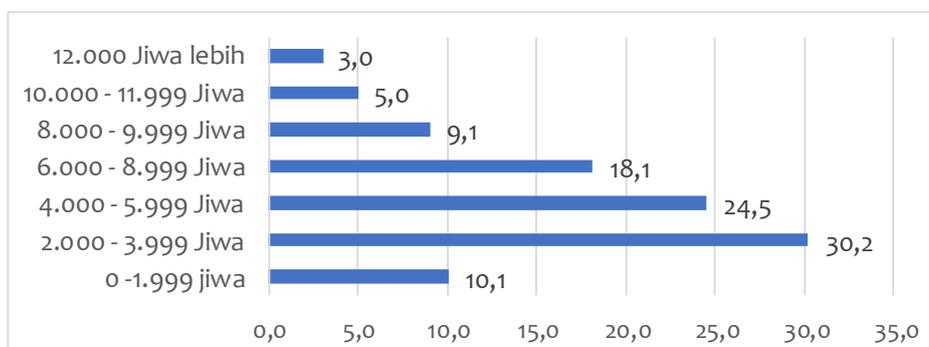
Kondisi infrastruktur dan sarana atau fasilitas publik secara umum sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 dalam kondisi baik. Sebagian besar desa (53,4%) memiliki kondisi infrastruktur dan sarana publik rata-rata dalam kondisi baik, dan sebagian lagi (35,6%) dalam kondisi sangat baik. Tidak ada desa dengan infrastruktur dan sarana publik yang sangat buruk secara keseluruhan.

3.1.1. Kapasitas SDM

Berdasarkan kapasitas SDM nya, sebagian besar penduduk desa mencapai jenjang pendidikan menengah ke bawah. Jumlah tertinggi adalah mereka yang hanya lulus sekolah dasar/SD (30,88%), sekolah menengah atas/SMA (24,26%), dan sekolah menengah pertama/SMP (23,29%). Selain itu terdapat 9,81% yang tidak lulus pendidikan dasar atau tidak pernah sekolah sebagaimana Gambar 4. Berdasarkan jumlah penduduknya, desa sampel penelitian cukup beragam, sebagian memiliki penduduk kurang dari 1.000 jiwa, di sisi lain ada yang memiliki lebih dari 18.000 jiwa. Tercatat jumlah penduduk terkecil sebanyak 551 jiwa, dan terbesar sebanyak 18.435 jiwa. Sebagian besar desa memiliki penduduk antara 2.000-6.000 orang, sebagaimana Gambar 5.

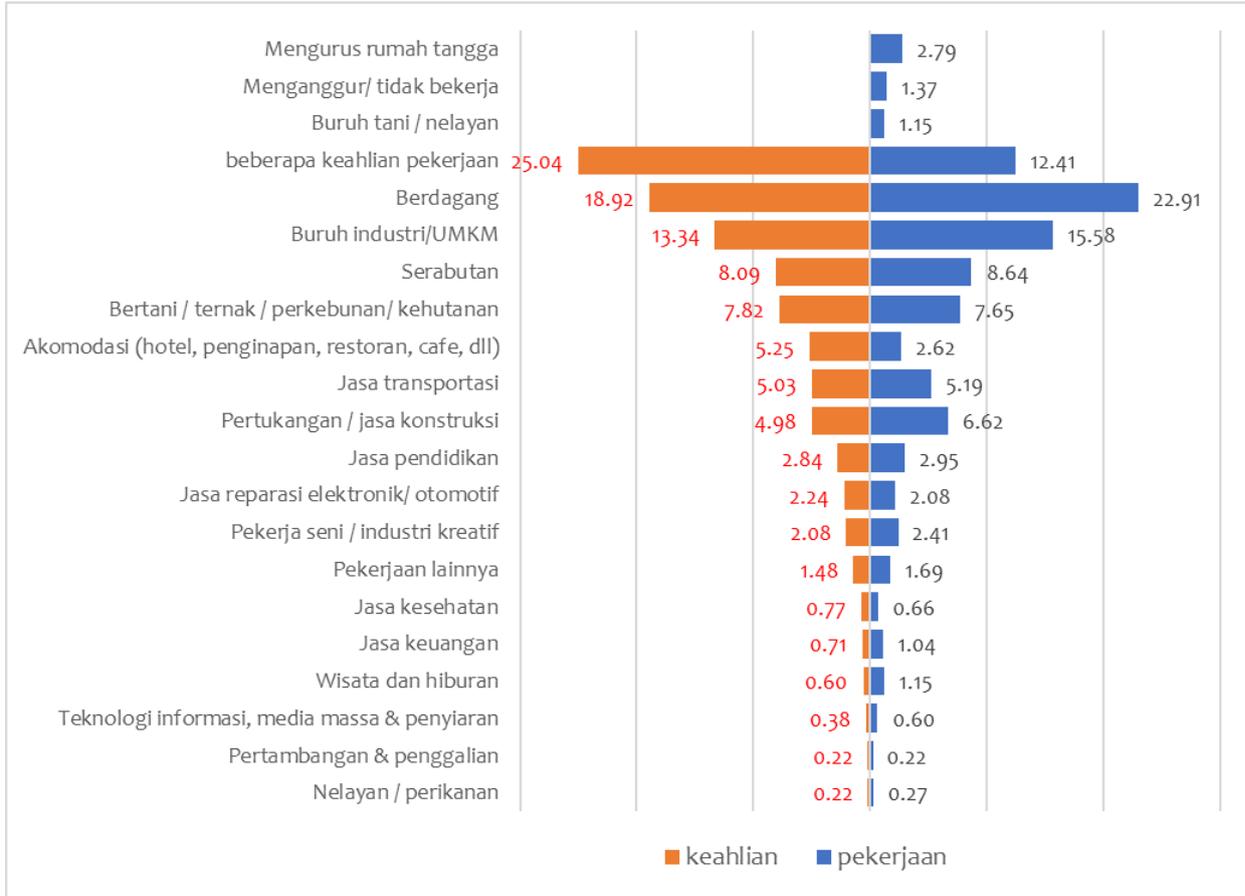


Gambar 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sampel Penelitian (%)

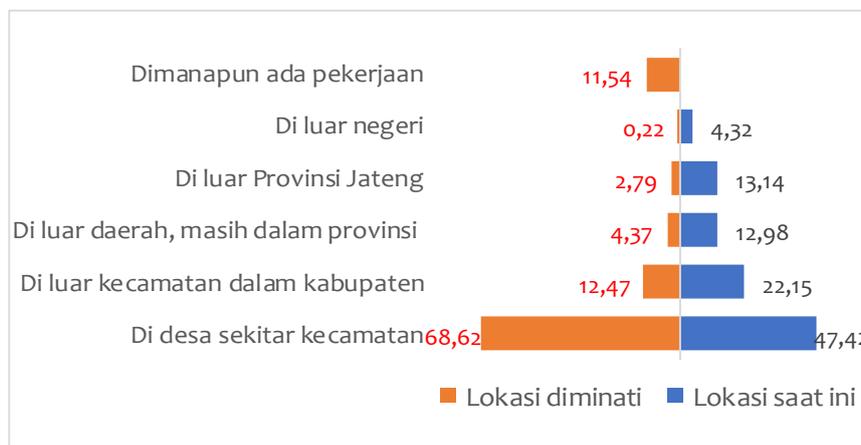


Gambar 5. Desa Sampel Penelitian Berdasarkan Jumlah Penduduk (%)

Sebagian tenaga kerja perdesaan menguasai beberapa keahlian sekaligus dimana mereka memiliki beberapa sumber pendapatan baik pertanian, perdagangan, tenaga serabutan, ataupun buruh. Berdasarkan pandangan para responden masyarakat desa, mereka lebih condong kepada aktivitas perdagangan, pekerja atau buruh dibandingkan pertanian, seperti terlihat pada Gambar 6. Sektor pertanian di desa sudah mulai tergeser oleh beberapa profesi lainnya. Penduduk desa memiliki keminatan yang besar untuk tetap tinggal dan bekerja di desanya. Di sisi lain pada kenyataannya lapangan pekerjaan di desa tidak memenuhi harapan mereka. Sebagian terpaksa harus bekerja di luar desa, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 7.



Gambar 6. Keahlian dan Jenis Pekerjaan Responden Masyarakat Desa (%)



Gambar 7. Lokasi Pekerjaan yang Diharapkan dan yang Dimiliki Saat Ini dari Responden Masyarakat Desa (%)

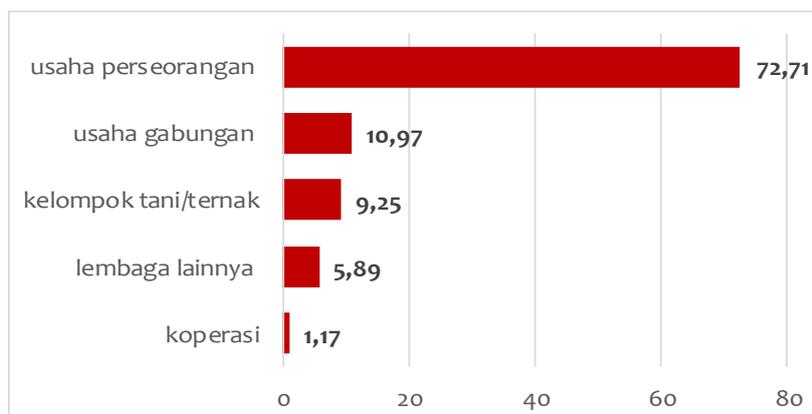
3.1.2. Sumber Daya Ekonomi

Dari aspek sumber daya ekonomi, sebagian besar desa sampel penelitian (88,93%) memiliki sektor ekonomi unggulan atau spesifik, sementara sebagian kecil lainnya (11,09%) tidak memiliki sektor spesifik. Jenis sektor unggulan desa yang terbanyak adalah meliputi pertanian dan peternakan, olahan pangan, industri kreatif, industri olahan hasil perkebunan, perdagangan, pariwisata, industri kecil serta jenis usaha

lainnya sebagaimana Gambar 8. Disisi lain, jenis lapangan usaha yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat desa, sebagian sesuai dengan potensi tersebut, sebagian berbeda. Sebagian masyarakat mengelola potensi desa sebagai sumber penghidupan utama mereka, contohnya pada sektor pertanian dan peternakan, namun sebagian lagi memilih usaha di sektor lain seperti perdagangan dan jasa seperti terlihat pada Gambar 8. Sektor perdagangan dan jasa merupakan jenis lapangan usaha yang saat ini banyak diminati penduduk desa. Olahan pangan, berbagai sektor UMK lainnya, dan industri olahan juga banyak dikembangkan oleh penduduk desa.



Gambar 8. Potensi Ekonomi dan Sektor Usaha Masyarakat di Desa Sampel Penelitian (%)



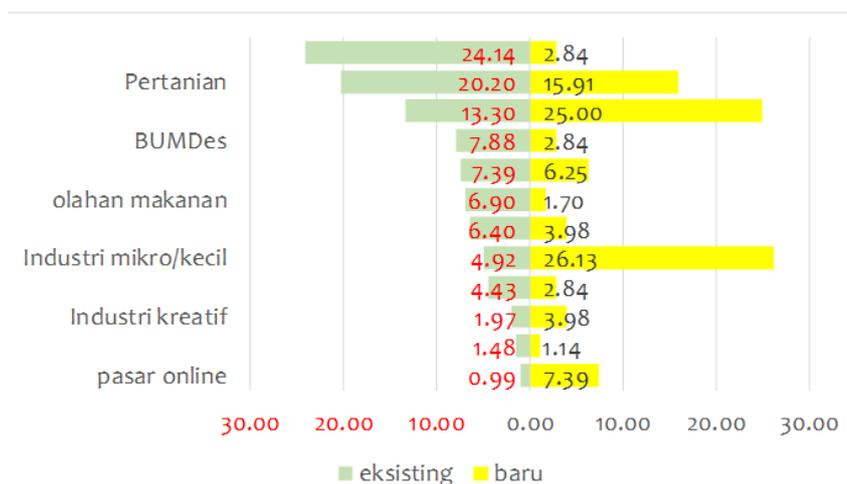
Gambar 9. Bentuk Lembaga Usaha di Desa Sampel Penelitian (%)

Berdasarkan aspek kelembagaan ekonominya, jenis usaha perseorangan merupakan lembaga usaha terbanyak di perdesaan. Sebanyak 72,71% lembaga usaha di desa berbentuk usaha perseorangan, kemudian diikuti kelompok atau gabungan beberapa orang. Selain itu kelompok tani dan ternak juga menjadi salah satu lembaga usaha dominan. Koperasi merupakan jenis lembaga usaha yang paling sedikit digunakan sebagaimana Gambar 9.

Pada aspek pengembangan ekonomi lokal, hampir semua desa memiliki produk unggulan yang menjadi sumber pendapatan masyarakatnya. Berdasarkan pengumpulan data diperoleh hasil bahwa sebanyak 61,42 persen pemerintah desa memiliki agenda mendukung, memfasilitasi atau menjalankan pengelolaan terkait dengan produk atau sektor unggulan, sementara sisanya 38,58 persen tidak melakukan upaya khusus untuk mendukung pengelolaan produk unggulan mereka. Fenomena yang kerap muncul adalah pemerintah desa mengembangkan unit usaha untuk pengelolaan produk unggulan berdasarkan trend yang sedang berkembang. Sebagai contoh dalam beberapa tahun terakhir trend

pariwisata atau pengelolaan wisata di perdesaan meningkat. Sebanyak 24,14 persen usaha yang dikelola pemerintah desa terkait dengan pariwisata, kemudian pertanian, serta usaha jasa dan sewa.

Selain unit usaha yang sudah ada, sebagian pemerintah desa (54,03%) juga mengembangkan kebijakan fasilitasi atau unit usaha pengelolaan produk atau sektor unggulan baru, dan sisanya (45,97%) tidak melakukan upaya tersebut. Rencana pengembangan usaha baru, banyak desa merencanakan pengembangan industri mikro/kecil, jasa dan sewa, serta pertanian. Pengelolaan pasar *online* juga mulai tumbuh dengan cukup signifikan di perdesaan sebagaimana Gambar 10.



Gambar 10. Pengelolaan Potensi Ekonomi dan Rencana Pengembangan Potensi Baru (%)

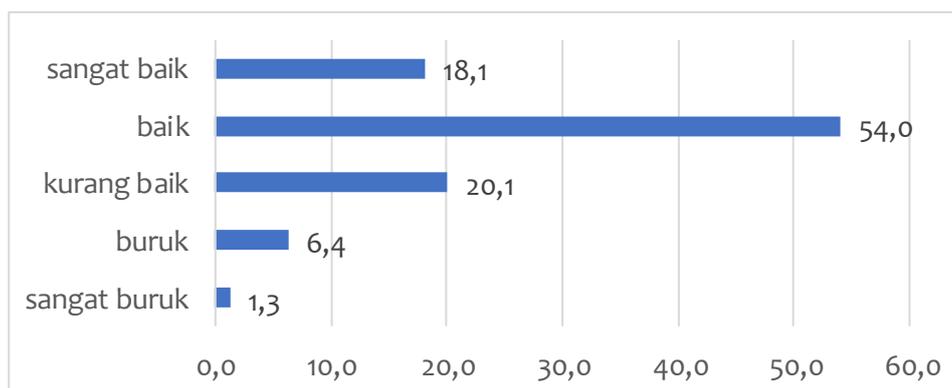
3.1.3. Infrastruktur

Kondisi infrastruktur di perdesaan sebagian besar sudah cukup memadai untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Berdasarkan informasi dari para kepala desa (data survey), diketahui bahwa 18,2 persen desa memiliki kondisi infrastruktur jalan yang sangat baik, kemudian 54 persen desa memiliki kondisi infrastruktur jalan yang baik. Terdapat 6,4 persen desa dengan infrastruktur jalan yang buruk dan 1,3 persen desa dengan infrastruktur jalan sangat buruk sebagaimana Gambar 11.

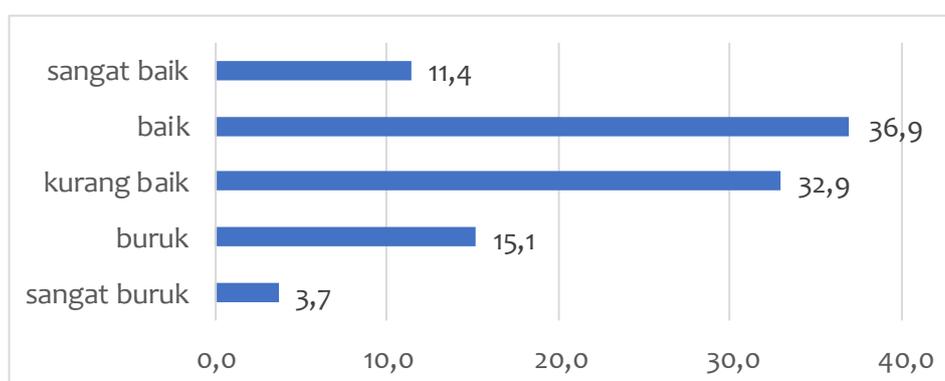
Untuk infrastruktur drainase dan irigasi, kondisinya tidak lebih baik dari infrastruktur jalan. Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat 3,7 persen desa dengan kondisi infrastruktur drainase dan irigasi sangat buruk, dan 15,1 dalam kondisi buruk, adapun kondisi infrastruktur baik terdapat di 36,9 persen desa dan sangat baik di 11,4 persen seperti halnya Gambar 12.

Selain infrastruktur dasar seperti jalan raya dan drainase, masyarakat juga membutuhkan akses informasi melalui jaringan internet. Jaringan internet pada saat ini merupakan fasilitas penting bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat desa. Jaringan internet bermanfaat untuk *transfer knowledge*, transaksi atau pemasaran produk, dan *update* informasi bagi masyarakat desa. Akan tetapi jaringan internet di desa belum cukup baik, dimana terdapat 9,7 persen desa sampel yang jaringan internetnya sangat buruk, dan 16,1 persen jaringan internetnya tergolong buruk seperti terlihat pada Gambar 13.

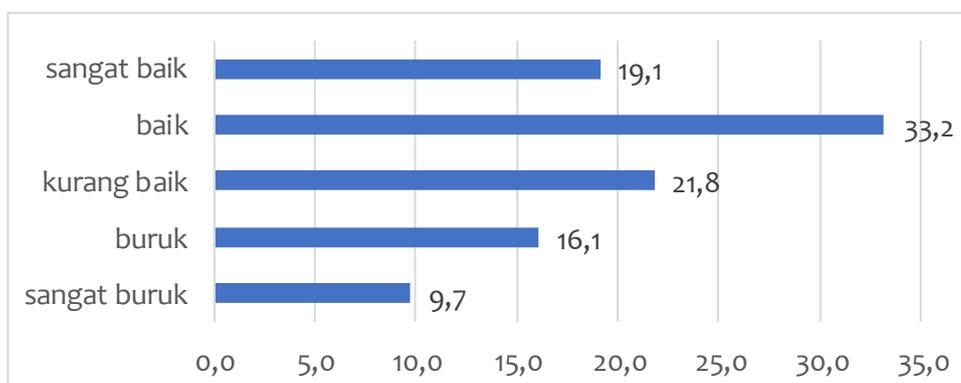
Ketersediaan energi secara umum sudah baik, dimana sebagian besar desa sudah memiliki suplai energi yang lancar. Meskipun demikian, sebanyak 5,4 persen desa masih menghadapi kendala ketersediaan energi yang sangat kurang, sebagaimana data pada Gambar 14.



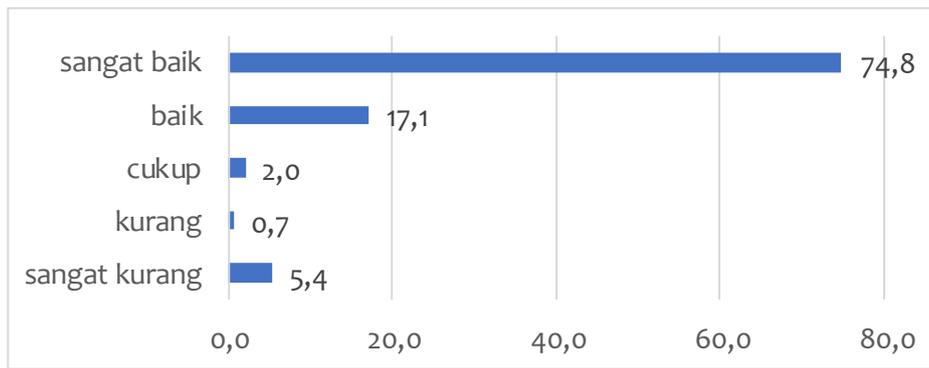
Gambar 11. Kondisi Infrastrukur Jalan Desa Sampel Penelitian (%)



Gambar 12. Kondisi Infrastrukur Drainase Desa Sampel Penelitian (%)

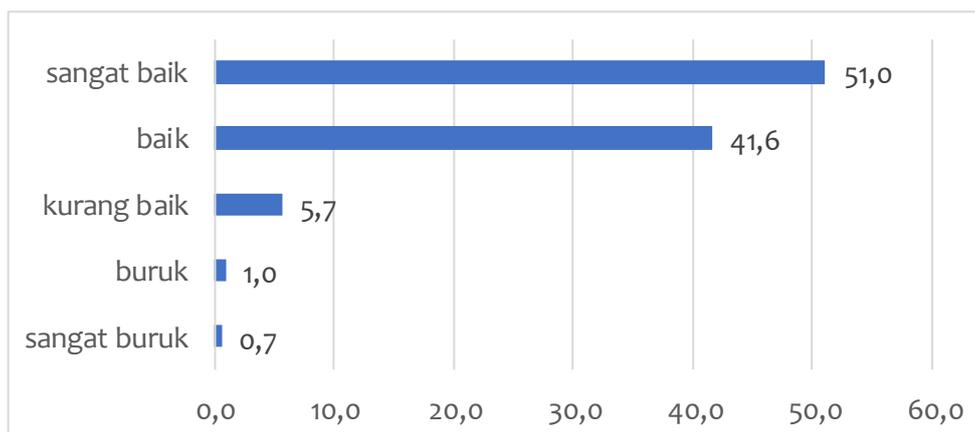


Gambar 13. Kondisi Jaringan Internet Desa Sampel Penelitian (%)

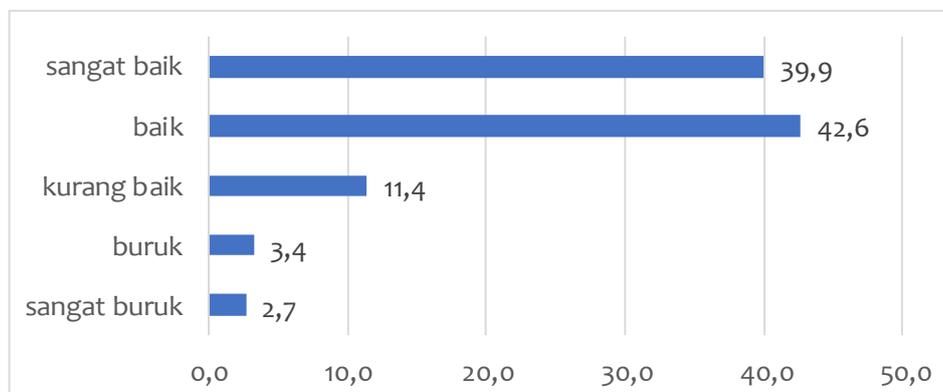


Gambar 14. Kondisi Ketersediaan Energi Desa Sampel Penelitian (%)

Pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan fasilitas utama dalam rangka peningkatan SDM perdesaan. Secara umum kondisi pelayanan pendidikan cukup memadai, dimana 51 persen desa memiliki fasilitas layanan pendidikan yang sangat baik, dan 41,3 persen lainnya memiliki fasilitas yang baik. Hanya terdapat 1 persen desa dengan fasilitas pelayanan yang sangat buruk, dan 0,7 persen tergolong buruk seperti pada Gambar 15. Fasilitas pelayanan kesehatan di 39,9 persen desa sampel tergolong sangat baik, serta 42,6 persen tergolong baik. Disisi lain terdapat 2,7 persen desa dengan pelayanan kesehatan yang sangat buruk, dan 3,4 persen layanan kesehatan buruk sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 16.



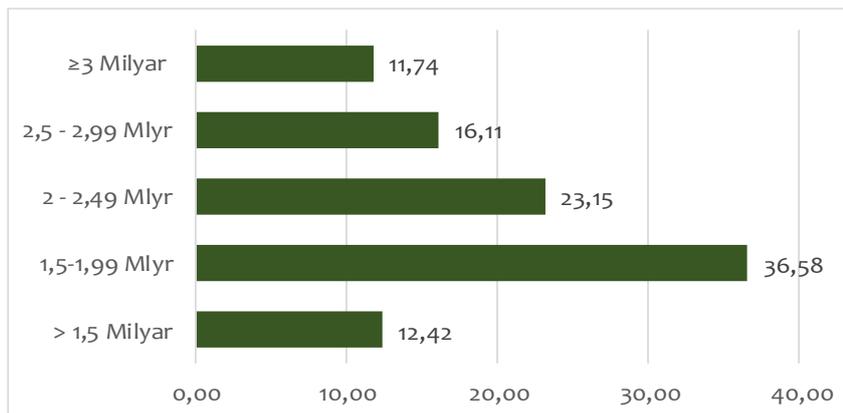
Gambar 15. Kondisi Fasilitas Pendidikan Desa Sampel Penelitian (%)



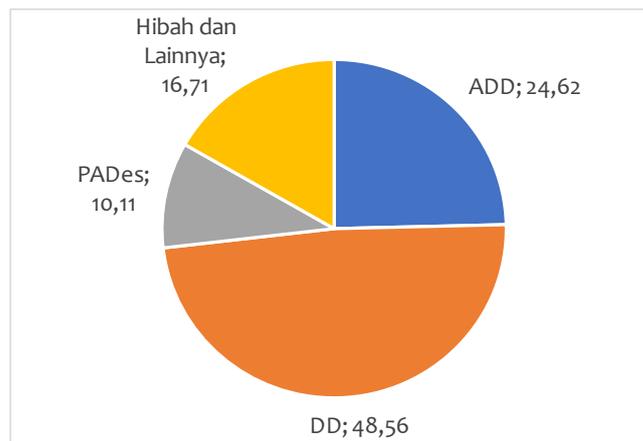
Gambar 16. Kondisi Fasilitas Kesehatan Desa Sampel Penelitian (%)

3.1.4. Finansial

Besaran Pendapatan desa sampel penelitian cukup beragam. Pendapatan terbesar tercatat Rp6.222.597.000,- dan terendah sebesar Rp1.116.010.400,-, dengan rata-rata Rp2.212.520.772,-. Sebagian besar desa (36,58%) memiliki pendapatan antara 1,5-2 milyar rupiah sebagaimana Gambar 17. Pendapatan desa tersebut berasal dari berbagai sumber, terutama adalah Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah, Pendapatan Asli Desa (PADes), serta hibah atau sumber lainnya.



Gambar 17. Nilai Pendapatan Pemerintah Desa Sampel Penelitian (%)

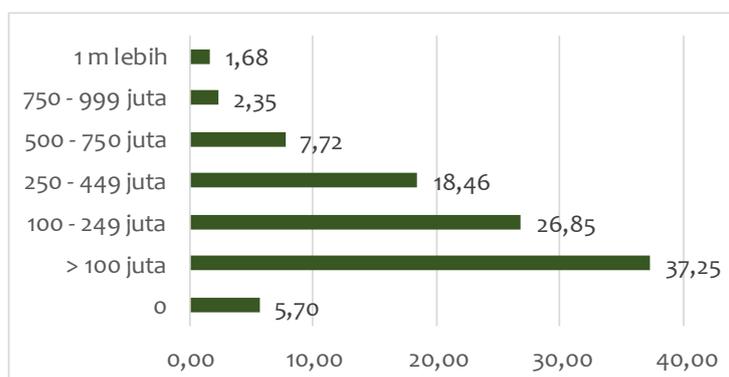


Gambar 18. Komposisi Pendapatan Pemerintah Desa Sampel Penelitian (%)

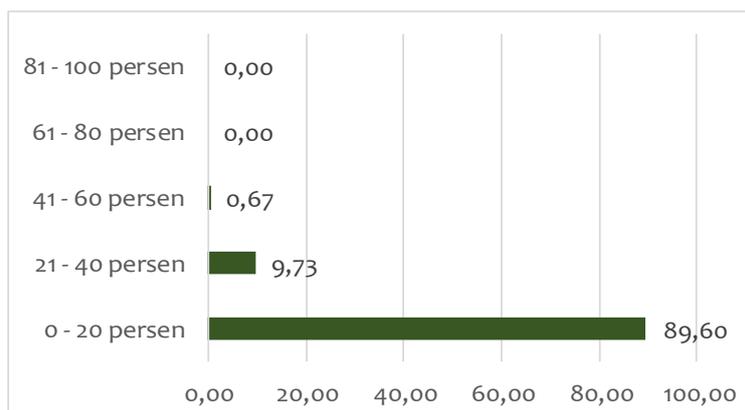
Dana Desa dari pemerintah pusat merupakan bagian terbesar dari pendapatan desa sampel penelitian. Secara total hampir separuh pendapatan desa berasal dari Dana Desa, yaitu sebesar 48,56 persen sebagaimana Gambar 18. Dana Desa tertinggi tercatat sebesar Rp1.996.734.000,-, dan terendah Rp688.836.000,- atau rata-rata sebesar Rp1.074.384.841,-. Sejumlah 63,42% desa memiliki komposisi Dana Desa antara 41-60 persen dibanding total pendapatan, dan sebagian lainnya (20,81%) memiliki komposisi Dana Desa di atas 80 persen.

Sumber kedua adalah Alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah dengan rata-rata sebesar 24,62 persen. Alokasi Dana Desa tertinggi tercatat sebesar Rp1.120.027.600,- dan terendah adalah Rp274.591.000,-, atau rata-rata Rp544.734.720,-. Sebagian besar desa (78,52%) memiliki komposisi ADD dibanding total pendapatan antara 21-40 persen, dan sebagian lainnya (20,81%) memiliki komposisi ADD kurang dari 21 persen.

Pendapatan Asli Desa (PADes) menunjukkan kemandirian fiskal sebuah desa. Pendapatan Asli Desa merupakan perolehan pendapatan yang berasal dari aset atau sumber daya desa secara mandiri, baik dari jasa sewa, jual beli, atau bagi hasil keuntungan. PADes secara umum rata-rata hanya sebesar 10,11 persen, dimana 89,60 persen desa komposisi PADes nya di bawah 20 persen dari total pendapatan sebagaimana Gambar 19. PADes terbesar adalah Rp2.100.198.000, dan terendah sebesar Rp500.000,-, atau rata-rata sebesar Rp237.132.470,-. Sebagian besar desa yang memiliki PADes menerima kurang dari 100 juta rupiah (42,95%), bahkan sebanyak 17 desa (5,7%) tidak memiliki PADes sama sekali sebagaimana Gambar 20.



Gambar 19. Nilai Pendapatan Asli Desa Sampel Penelitian (%)



Gambar 20. Komposisi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDes Sampel Penelitian (%)

Sumber pendapatan lain-lain dengan komposisi sebesar 16,71 persen. Dana ini diperoleh dari hibah atau bantuan, atau sumber lain yang diterima desa di luar ADD, DD, dan PADes yang diterima dari berbagai sumber secara sah. Dana hibah yang diterima paling besar tercatat Rp3.495.214.000,- dan terkecil sebesar Rp743.000,-, dan terdapat 10 (3,36%) desa yang tidak menerima dana Hibah. Sebagian besar desa yang menerima dana hibah (72,82%) memiliki komposisi Dana Hibah 20 persen atau kurang dari itu, dan sebagian lagi (23,49%) memiliki Dana Hibah antara 21-40 persen, kemudian antara 61-80 persen (3,36%) dan sisanya (0,34%) memiliki komposisi hibah diatas 80 persen.

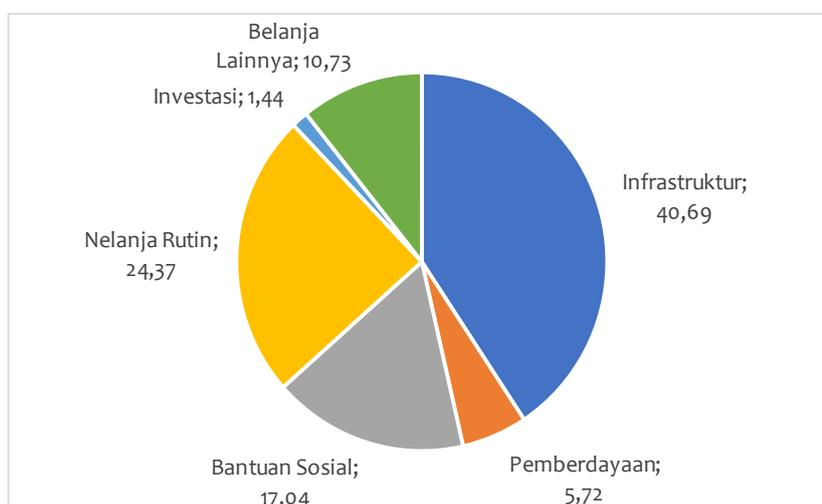
Profil pendapatan desa sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan data tersebut, kemandirian fiskal desa sangat lemah dimana sangat bergantung pada dana pemerintah pusat dan daerah. Dapat dilihat bahwa bagian terbesar pendapatan daerah adalah Dana Desa dari pemerintah pusat, kemudian Alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah. Selanjutnya adalah dana hibah yang sebagiannya juga berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (terutama provinsi). Adapun Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bagian terkecil di hampir semua desa. Tidak semua desa memiliki PADes, tercatat ada 17 desa (5,70%) yang tidak memiliki PADes.

Tabel 1. Komposisi Pendapatan Desa Sampel Penelitian

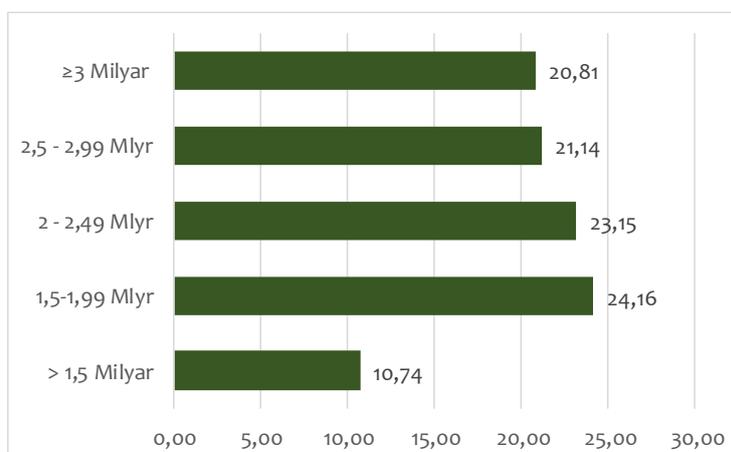
Komponen	Komposisi (%)	Minimal	Maksimal	Ada (%)	Tidak (%)
DD	48,56	688.836.000	1.996.734.000	100	0
ADD	24,62	274.591.000	1.120.027.600	100	0
Hibah dan Lainnya	16,71	743.000	3.495.214.000	94,30	5,70
PADes	10,11	500.000	2.100.198.000	96,64	3,36

Sumber: Data primer, 2020

Dari aspek belanja, secara total komposisi belanja terbesar adalah untuk infrastruktur (40,69%), kemudian untuk belanja rutin kantor (24,37%), belanja bantuan sosial (17,04%), dan belanja lainnya (10,73%). Adapun komponen belanja terkecil adalah pemberdayaan (5,72%) dan belanja investasi hanya 1,44 persen saja sebagaimana Gambar 21. Jumlah besaran belanja desa sampel penelitian cukup beragam, dimana belanja terbesar adalah Rp5.712.939.561, adapun belanja terkecil tercatat senilai Rp948.975.800, -, dan rata-rata sebesar Rp2.417.354.178,-. Komposisi Belanja terbesar adalah antara 1,5-1,99 milyar rupiah (24,16%), kemudian antara 2-2,49 milyar rupiah (23,15%), antara 2,5-2,99 milyar rupiah (21,14%), dan 3 milyar atau lebih (20,81%). Adapun sisanya yaitu 10,74% memiliki jumlah belanja dibawah 1,5 milyar rupiah sebagaimana Gambar 22.

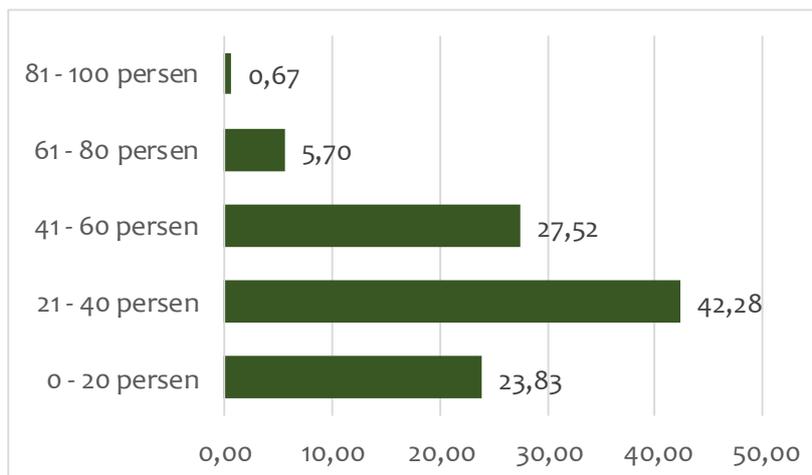


Gambar 21. Komposisi Belanja Pemerintah Desa Sampel Penelitian (%)

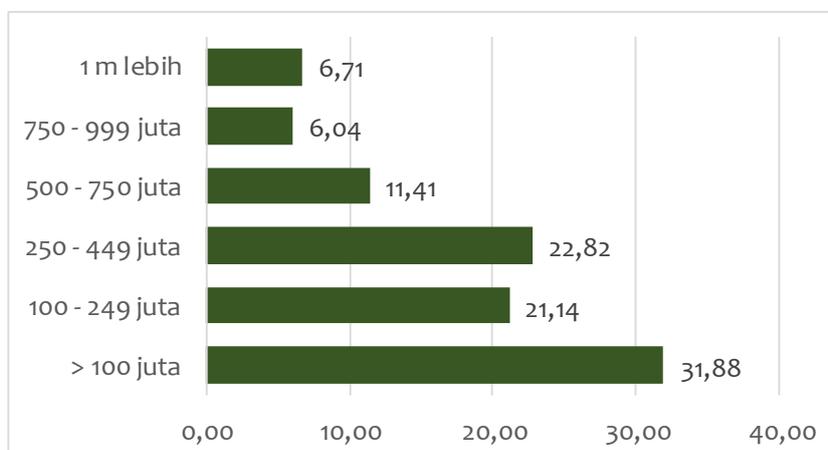


Gambar 22. Nilai Belanja Pemerintah Desa Sampel Penelitian (%)

Belanja infrastruktur paling besar tercatat Rp3.678.612.850,- dan terkecil sebesar Rp32.544.000,-, hanya ada 4 desa (1,34%) yang tidak mengalokasikan belanja infrastruktur. Sebesar 31,88% desa mengalokasikan belanja infrastruktur kurang dari 100 juta rupiah, dan sebesar 6,71% mengalokasikan belanja di atas 1 milyar rupiah sebagaimana Gambar 23. Sebagian besar desa (42,28%) mengalokasikan antara 21-40 persen dari total belanja, dan sebanyak 27,52% desa mengalokasikan belanja infrastruktur antara 41-60 persen dari total belanja mereka, dan Sebagian desa lainnya (23,83%) mengalokasikan belanja infrastruktur 20 persen atau kurang dari itu. Sisanya (5,70%) mengalokasikan belanja infrastruktur antara 61-80 persen dan sebagian kecil lainnya (0,67%) mengalokasikan belanja infrastruktur di atas 80 persen dari total belanja mereka sebagaimana Gambar 24.



Gambar 23. Komposisi Belanja Infrastruktur Desa Sampel Penelitian (%)



Gambar 24. Besaran Belanja Infrastruktur Desa Sampel Penelitian (%)

Belanja pemberdayaan paling besar tercatat Rp933.912.000,- dan terkecil sebesar Rp2.000.000,-, dan ada 10 desa (3,36%) yang tidak mengalokasikan belanja pemberdayaan. Sebagian besar desa yang mengalokasikan belanja pemberdayaan (87,92%) tercatat dengan nilai kurang dari 100 juta rupiah, dan antara 100-249 juta rupiah (8,05%). Adapun belanja pemberdayaan antara 250-449 juta rupiah sebesar 3,02 persen dan 500-750 juta rupiah hanya 1,01%. Rata-rata komposisi belanja pemberdayaan terhadap total belanja desa adalah 4,90 persen, adapun komposisi tertinggi sebesar 38,81 persen dan terendah 0,12 persen. Sebagian besar desa yang mengalokasikan belanja pemberdayaan (97,32%) mengalokasikannya

sebesar 20 persen atau dibawah itu dari total belanja mereka. Adapun sebagian kecil (2,68%) desa mengalokasikan belanja pemberdayaan antara 21-40 persen dari total belanja mereka.

Belanja bantuan sosial paling besar tercatat Rp1.290.163.323,- dan terkecil sebesar Rp1.361.347,-, dan ada 32 desa (10,74%) yang tidak mengalokasikan belanja bantuan sosial. Sebagian desa yang mengalokasikan belanja bantuan sosial kurang dari 100 juta rupiah (36,91%), antara 100-249 juta rupiah (33,56%), dan antara 250-449 juta rupiah (24,50%). Sisanya, sebagian kecil desa mengalokasikan antara 500-750 juta rupiah (3,36%), dan 750-999 juta rupiah (1,68%). Rata-rata komposisi belanja bantuan sosial terhadap total belanja desa adalah 16,69 persen, adapun komposisi tertinggi sebesar 48,56 persen dan terendah 0,12 persen. Sebagian besar desa yang mengalokasikan belanja bantuan sosial (69,13%) mengalokasikan belanja bantuan sosial sebesar 20 persen atau dibawah itu dari total belanja mereka. Adapun sebagian lainnya (30,20%) mengalokasikan belanja bantuan sosial antara 21-40 persen dari total belanja mereka. Sisanya, sebagian kecil (0,67%) mengalokasikan bantuan sosial diatas 40 persen.

Belanja operasional kantor merupakan belanja rutin untuk keperluan operasional pemerintahan desa. Belanja operasional kantor besar tercatat Rp1.922.451.299,- dan terkecil sebesar Rp2.400.000,-, dan ada 12 desa (4,03%) yang tidak mengalokasikan belanja operasional kantor. Sebagian desa mengalokasikan belanja operasional kantor tercatat kurang dari 100 juta rupiah (42,28%), kemudian antara 250-449 juta rupiah (20,47%). Sebagian lagi mengalokasikan antara 500-750 juta rupiah (13,76%), dan antara 750-999 juta rupiah (13,76%), sisanya antara 100-249 juta rupiah (9,73%). Rata-rata komposisi belanja operasional kantor terhadap total belanja desa adalah 21,03 persen, adapun komposisi tertinggi sebesar 79,87 persen dan terendah 0,13 persen. Sebagian desa yang mengalokasikan belanja operasional kantor (45,30%) mengalokasikan sebesar 20 persen atau dibawah itu, sebagian lagi (44,30%) mengalokasikan antara 21-40 persen belanja operasional kantor dari total belanja mereka. Adapun sebagian kecil lainnya (9,73%) mengalokasikan belanja operasional kantor antara 41-60 persen dan sisanya (0,67%) mengalokasikan lebih dari 60 persen dari total belanja mereka.

Belanja investasi dialokasikan untuk menghasilkan keuntungan atau membuka peluang usaha bagi masyarakat, atau diinvestasikan ke pihak ketiga. Belanja investasi terbesar tercatat Rp1.137.000.000,- dan terkecil sebesar Rp1.867.000,-, dan ada 203 desa (68,12%) yang tidak mengalokasikan belanja investasi. Sebagian besar desa yang mengalokasikan belanja investasi tercatat kurang dari 100 juta rupiah (97,65%), dan sisanya (2,35%) mengalokasikan investasi diatas 100 juta rupiah. Rata-rata komposisi belanja investasi terhadap total belanja desa adalah 3,85 persen, adapun komposisi tertinggi sebesar 33,26 persen dan terendah 0,07 persen. Sebagian besar desa yang mengalokasikan belanja investasi (98,99%) mengalokasikan paling tinggi 20 persen atau dibawah itu, sebagian kecil lainnya (1,01%) mengalokasikan antara 21-40 persen belanja investasi dari total belanja mereka.

Belanja lainnya dialokasikan untuk berbagai keperluan di luar belanja yang sudah disebutkan di atas. Belanja lainnya terbesar tercatat Rp2.287.610.390,- dan terkecil sebesar Rp418.920,-, dan ada 130 desa (43,62%) yang tidak mengalokasikan belanja lainnya. Sebagian besar desa yang mengalokasikan belanja lainnya tercatat kurang dari 100 juta rupiah (76,85%), antara 250-449 juta rupiah (7,05%), antara 750-999 juta rupiah (6,71%), dan antara 100-249 juta rupiah (6,04%), sisanya adalah antara 500-750 juta rupiah (3,36%). Rata-rata komposisi belanja investasi terhadap total belanja desa adalah 14,85 persen, adapun komposisi tertinggi sebesar 72,56 persen dan terendah 0,02 persen. Sebagian besar desa yang mengalokasikan belanja lainnya (84,23%) paling tinggi mengalokasikan 20 persen atau dibawah itu, sebagian lainnya (9,40%) mengalokasikan antara 21-40 persen, dan antara 41-60 persen (5,37%). Sisanya sebagian kecil desa (1,01%) mengalokasikan belanja lainnya di atas 60 persen dari total belanja mereka.

Secara umum belanja desa didominasi oleh belanja infrastruktur, kemudian belanja rutin/operasional kantor, bantuan sosial, belanja lainnya, pemberdayaan, dan investasi. Belanja pemberdayaan dan investasi terbilang jauh lebih kecil dibanding belanja lainnya. Hal tersebut menunjukkan prioritas sebagian besar desa untuk infrastruktur, pemberdayaan, serta investasi belum menjadi perhatian. Bahkan untuk belanja investasi hanya dialokasikan oleh 31,88 persen desa saja, selebihnya tidak mengalokasikan, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Belanja Desa Sampel Penelitian

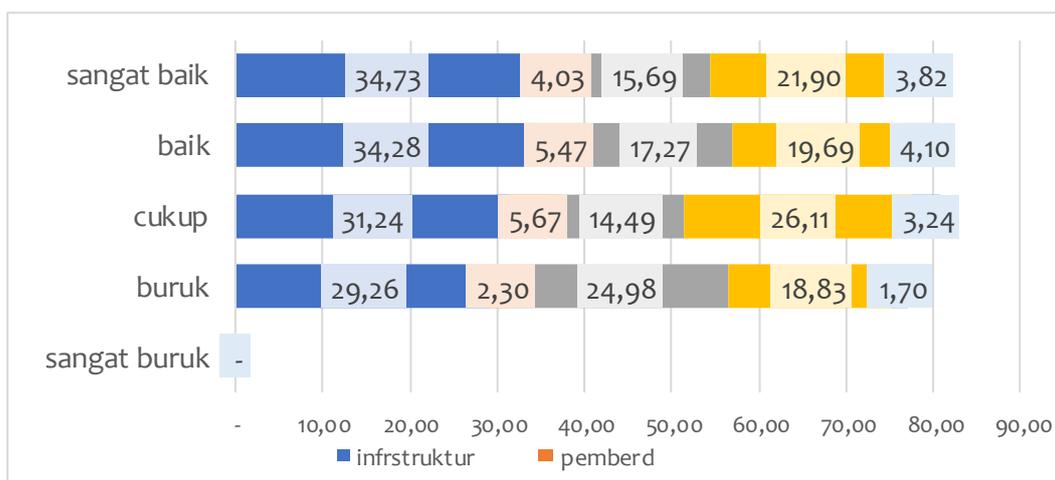
Komponen	Komposisi	Minimal	Maksimal	Ada (%)	Tidak ada (%)
Infrastruktur	40,6	32.544.000	3.678.612.850	98,66	1,34
Belanja Rutin	24,37	2.400.000	1.922.451.299	96,64	3,36
Bantuan Sosial	17,04	1.361.347	1.290.163.323	89,26	10,74
Lainnya	10,73	418.920	2.287.610.390	95,97	4,03
Pemberdayaan	5,72	2.000.000	933.912.000	31,88	68,12
Investasi	1,44	1.867.000	1.137.000.000	56,38	43,62

Sumber: Data Peneliti, 2020

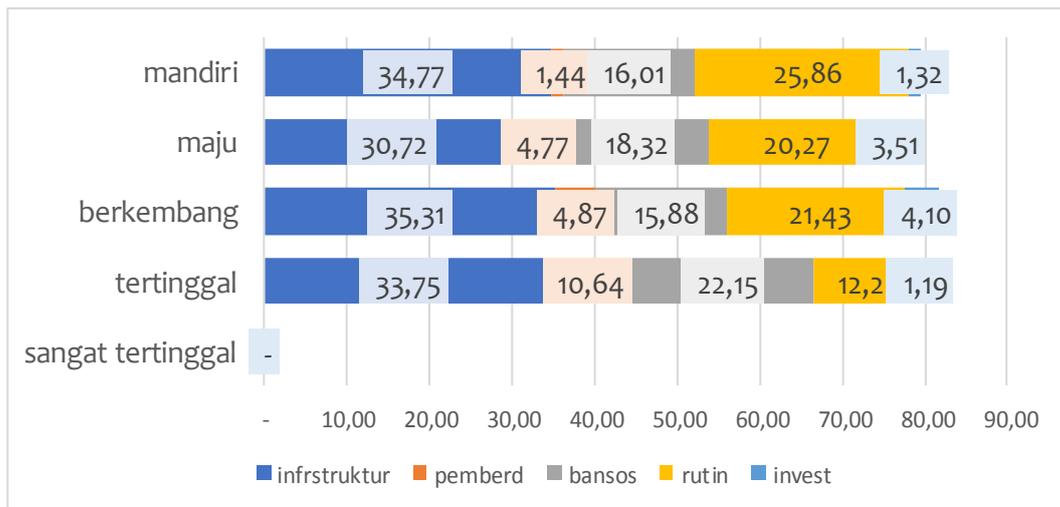
Belanja infrastruktur tertinggi berada di desa-desa dengan kondisi infrastruktur yang sangat baik, yaitu sebesar 34,73 persen. Adapun komposisi belanja infrastruktur terendah pada desa dengan kondisi infrastruktur yang buruk yaitu 29,26 persen. Belanja pemberdayaan relatif tinggi pada desa dengan kondisi infrastruktur yang cukup dan baik, dan terkecil pada desa dengan infrastruktur buruk. Belanja bantuan sosial di desa dengan kondisi infrastruktur yang buruk justru lebih tinggi. Belanja rutin relatif sama di berbagai desa, tertinggi di desa dengan infrastruktur cukup yaitu 26 persen dan terendah di desa dengan infrastruktur buruk. Belanja investasi terendah di desa dengan infrastruktur buruk yaitu 1,7 persen dan tertinggi di desa dengan kondisi infrastruktur baik yaitu 4,10 persen dan sangat baik 3,82 persen sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 25.

Jika dikaitkan dengan status pembangunan desa, alokasi belanja infrastruktur pada desa berkembang dan maju relatif lebih besar dibanding desa tertinggal. Disisi lain komposisi alokasi belanja bantuan sosial relatif lebih besar pada desa tertinggal. Adapun belanja investasi sangat kecil dimana hampir seluruhnya berada pada level sangat kecil.

Belanja infrastruktur relatif setara antara desa tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri, dimana tertinggi ada di desa berkembang yaitu 35,31 persen dan terendah di desa maju sebesar 30,72 persen. Belanja pemberdayaan tertinggi di desa tertinggal sebesar 10,64 persen dan terendah di desa mandiri sebesar 1,4 persen. Belanja bantuan sosial tertinggi di desa mandiri sebesar 25,86 persen dan terendah di desa tertinggal sebesar 12,26 persen. Adapun belanja investasi tertinggi di desa berkembang sebesar 4,10 persen dan maju sebesar 3,5 persen, di desa mandiri sebesar 1,32 persen, dan terendah di desa tertinggal sebesar 1,19 persen sebagaimana Gambar 26.

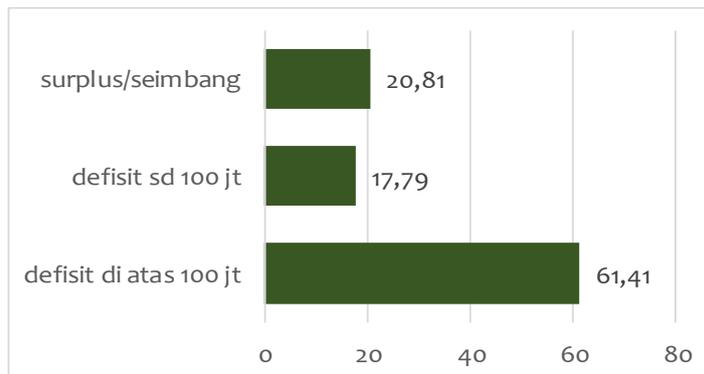


Gambar 25. Perbandingan Komposisi Belanja dan Kondisi Infrastruktur Desa Sampel Penelitian (%)

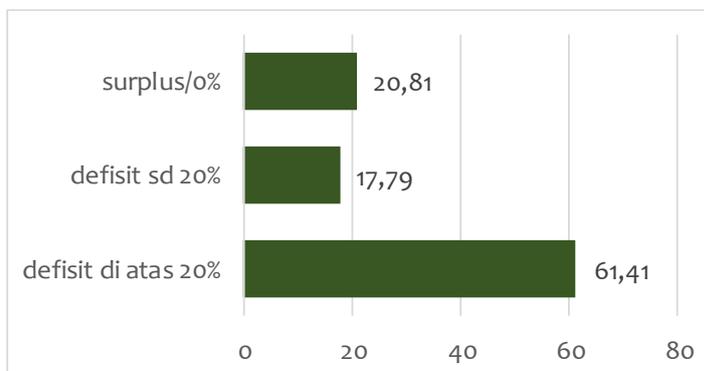


Gambar 26. Perbandingan Komposisi Belanja dan Status Pembangunan Desa Sampel Penelitian (%)

Sebagian besar desa mengalami defisit di dalam pengelolaan anggaran dan belanja mereka dengan rata-rata Rp204.833.406,-. Sejumlah desa mengalami defisit dibawah 100 juta rupiah 17,79% dan diatas 100 juta rupiah sebesar 61,41 persen sebagaimana Gambar 27. Lebih dari 60 persen mengalami defisit di bawah 20% dari pendapatan, dan hanya 20,81 persen desa yang tidak mengalami defisit anggaran sebagaimana Gambar 28.



Gambar 27. Jumlah Defisit Anggaran Desa Sampel Penelitian (%)



Gambar 28. Persentase Defisit Anggaran Desa Sampel Penelitian (%)

3.2. Pembahasan

Pembahasan penelitian ini didasari oleh jenis modal utama yang menjadi sumber daya penting dalam konsep *livelihood* (Scoones, 1998) yaitu modal manusia (keterampilan, pengetahuan), modal alam (sumber daya alam), modal fisik (infrastruktur dan pendukungnya), serta modal finansial (pendapatan, anggaran, aset), sekaligus melihat tata kelola dan arah pembangunan desa.

Pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan disorot dalam beberapa penelitian. Nuradhawati (2020) menekankan perlunya sumber daya yang kompeten untuk menjawab tantangan era 4.0, dan Bire et al. (2024) membahas pentingnya peningkatan kapasitas aparat desa dalam meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola. Studi-studi ini menggarisbawahi pentingnya peran kapasitas sumber daya manusia dalam pembangunan perdesaan. Sumber daya manusia perdesaan pada saat ini dari aspek kuantitas sudah cukup memadai sebagai pelaku pembangunan. Jumlah penduduk cukup besar di sebagian desa lainnya, dan rata-rata mencapai 2.000-6.000 jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan potensi pembangunan, terutama sebagai penyedia tenaga kerja dan pangsa pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Disisi lain kapasitas SDM perdesaan memang perlu ditingkatkan. Sebagaimana data yang disajikan sebelumnya, bahwa sebagian besar penduduk desa mencapai jenjang pendidikan menengah ke bawah, dan yang tertinggi adalah jenjang SD, kemudian SMA, dan SMP, bahkan sebagian tidak tamat SD.

Penduduk yang tinggal di desa memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup rendah. Adapun SDM yang kompeten biasanya akan mencari pekerjaan di kota. Pengembangan sumber daya manusia di perdesaan sangat penting bagi pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi (Hidayah, 2022; Hermanto, 2018). Namun, dengan peluang pekerjaan yang sempit di perdesaan, akhirnya mendorong tenaga berkualitas menuju kota, sehingga semakin membuat desa tertinggal (Rustiadi et al., 2009).

Penduduk desa sebetulnya memiliki keminatan yang besar untuk tetap tinggal dan bekerja di desanya, namun pada kenyataannya lapangan pekerjaan di desa tidak memenuhi harapan mereka. Sebagian terpaksa harus bekerja di luar desa. Lapangan kerja utama di desa adalah pertanian yang dianggap kurang menarik bagi generasi muda, apalagi yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Jenis pekerjaan lainnya adalah buruh tani, yaitu mereka yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri, dan sebagian juga berprofesi sebagai buruh harian lepas. Adapun sektor jasa menempati komposisi paling rendah.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan kapasitas SDM perdesaan, di satu sisi menjadikan lapangan pekerjaan di desa menarik. Pertanian dengan berbagai diversifikasinya perlu didorong menjadi sektor yang menarik bagi generasi muda. Begitu juga sektor lainnya seperti jasa dan industri kreatif juga menjadi potensi lapangan pekerjaan yang cukup menarik bagi generasi muda. Adapun dalam kaitan peningkatan SDM, memerlukan dukungan pemerintah, akses informasi, dan anggaran (Hidayah, 2022) yang dapat dicapai melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan diskusi (Nuradhawati, 2020).

Aspek utama yang perlu disentuh dalam pembangunan desa adalah sumber daya manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Daldjoeni & Suyitno (2004) bahwa ada situasi problematik salah satunya pengetahuan yang rendah menyebabkan pemanfaatan yang kelewat batas atas sumber daya alam untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM desa menjadi sangat penting. Disisi lain banyak SDM desa yang berpotensi memilih ke luar desa karena di desa tidak tersedia lapangan pekerjaan yang diinginkan. Oleh sebab itu perlu ada formula pembangunan desa yang mampu meningkatkan kapasitas SDM sekaligus menyediakan ruang untuk berkreasi. Pembangunan perdesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas (Sahyana, 2019).

Berdasarkan potensi ekonomi, sebagian besar desa memiliki satu atau beberapa sektor ekonomi unggulan yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakatnya, meskipun disisi lain terdapat desa yang tidak memiliki potensi ekonomi spesifik, terutama di sekitar area perkotaan. Berdasarkan data yang terkumpul, potensi terbesar adalah pertanian dalam arti luas dan industri olahan terutama olahan pangan

dan hasil perkebunan. Penelitian potensi ekonomi desa telah mengidentifikasi berbagai faktor dan strategi pembangunan. Putranto & Kusumaningtyas (2024) menyoroti potensi ekonomi kreatif dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Sugiono et al., 2020) menekankan pentingnya memahami dan memanfaatkan potensi ekonomi spesifik setiap desa, dan Husaeni (2017) menyoroti peran infrastruktur dan kelompok tani. Sektor pendukung lainnya seperti perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri kreatif lainnya juga muncul di perdesaan. Namun, sebagian besar penduduk justru memilih usaha di sektor lain seperti perdagangan dan jasa yang kini mulai banyak diminati penduduk desa. Jenis pekerjaan lainnya yang banyak diminati adalah industri olahan pangan.

Kecenderungan pergeseran minat ini dapat dipahami karena memang sektor pertanian mengalami penurunan nilai. Sebagaimana data PDRB Jawa Tengah, sektor pertanian kini menempati posisi ketiga di bawah industri pengolahan dan perdagangan. Hal ini juga dijelaskan sumber lain dimana keterbelakangan perdesaan terjadi ketika terlalu terspesialisasi pada satu komoditas pertanian atau sumber daya alam (*overly-specialized single crop or natural resource economies*) untuk melayani perkotaan (Rustiadi et al., 2009). Tarigan (2008) dan Lewis dalam Rustiadi et al. (2009) juga menyatakan bahwa perkembangan suatu wilayah akan mengalami stagnasi bila hanya satu sektor saja yang dikembangkan. Maka pembangunan wilayah merupakan upaya memadukan berbagai sektor dimana keterpaduan tersebut membutuhkan pengelolaan yang terpadu dan kerjasama antar *stakeholder* yang terlibat.

Pada aspek kelembagaan usaha, saat ini penduduk desa masih cenderung lebih banyak berusaha secara perorangan meskipun berbagai upaya pengembangan usaha kelompok telah dilaksanakan. Usaha perorangan tersebut masih berstatus usaha mikro, tanpa status badan hukum atau legalitas yang mapan, usaha masih dijalankan sebagai bisnis keluarga tanpa manajemen yang profesional. Selain usaha perorangan, beberapa kelompok pemberdayaan ekonomi cukup potensial sebagai penggerak ekonomi desa. Kelompok berbasis perempuan seperti PKK dan KWT merupakan potensi penting lembaga ekonomi desa. Kelompok lainnya adalah lembaga usaha seperti kelompok tani, ILMDH, kelompok sadar wisata, karangtaruna, atau kelompok usaha lainnya. Kelompok tersebut perlu mendapatkan dukungan dari aspek penguatan kelembagaan, kapasitas modal dan peralatan, tata kelola, serta jaringan pemasaran.

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam pembangunan di perdesaan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, infrastruktur terutama jalan menjadi perhatian utama pembangunan perdesaan. Sebagian perdesaan di Jawa Tengah sudah memiliki infrastruktur memadai untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, kecuali di sebagian kecil lokasi. Lebih dari 80 persen desa memiliki kondisi infrastruktur dan sarana pelayanan publik yang cukup baik, serta hanya sebagian kecil yang buruk, dan tidak ada desa dengan infrastruktur dan sarana publik yang sangat buruk secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan temuan Tajuddin et al. (2020) dimana pembangunan infrastruktur selalu mendapatkan perhatian dan memiliki kategori pelaksanaan yang baik.

Kondisi infrastruktur jalan di sebagian besar desa terbilang cukup baik, kecuali sebagian kecil lokasi yang memang belum tersedia dengan baik. Adapun infrastruktur drainase dan irigasi kondisinya sedikit lebih buruk dibanding jalan dimana lebih dari 18 persen desa memiliki infrastruktur drainase dan irigasi yang buruk. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk desa-desa dengan kondisi infrastruktur jalan yang tergolong baik penting untuk mengalokasikan dana pembangunan lebih banyak ke sektor lain, terutama pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan peningkatan ekonomi. Jika terpaksa mengalokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan, maka perlu dianalisis sesuai kebutuhan, dan juga lebih diutamakan untuk membenahi irigasi atau drainase.

Disisi lain, jaringan internet perdesaan masih dalam kondisi kurang baik. Internet merupakan sarana penting saat ini yang bermanfaat untuk *transfer knowledge*, transaksi atau pemasaran produk, dan *update* informasi. Oleh sebab itu penyediaan jaringan internet perlu menjadi fokus pembangunan perdesaan. Adapun untuk akses energi, saat ini sumber energi di perdesaan cukup baik, hanya sebagian kecil desa yang mengalami kesulitan akses energi. Namun demikian pembangunan perdesaan juga perlu menysasar penyediaan energi alternatif.

Dari aspek sarana dan prasarana pelayanan pendidikan di sebagian besar desa terbilang cukup memadai meskipun untuk jenjang tertentu, terutama lanjutan perlu ditingkatkan. Kondisi infrastruktur layanan pendidikan dasar di perdesaan secara umum cukup baik, hanya untuk pelayanan lanjutan perlu peningkatan aksesibilitas. Adapun untuk layanan kesehatan dasar di sebagian desa masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat desa dengan kondisi pelayanan buruk atau bahkan sangat buruk. Upaya penguatan sarana dan sumber daya pelayanan kesehatan di tingkat desa masih perlu ditingkatkan.

Masalah ini sesuai dengan hasil penelitian Mali et al. (2019) dimana desa menghadapi masalah minimnya sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang belum memadai. Pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat desa (Rosalina, 2013).

Dari aspek anggaran, jumlah anggaran di setiap desa juga sudah relatif memadai dimana sebagian besar desa memiliki anggaran pembangunan lebih dari 1,5 milyar rupiah, bahkan ada yang hampir mencapai 6 milyar rupiah. Disisi lain, sebagian besar pemerintah desa belum mandiri secara finansial. Sebagaimana data sebelumnya, sumber dana terbesar desa adalah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta sebagian dari dana hibah. Adapun Pendapatan Asli Desa sangat kecil komposisinya, dan ada desa yang tidak memilikinya.

Rata-rata lebih dari separuh pendapatan desa berasal dari Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Selanjutnya adalah Alokasi Dana Desa dari perimbangan keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk berbagai kegiatan terutama operasional pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Setiap desa dapat dipastikan akan menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang merupakan sumber utama pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Selanjutnya adalah dana hibah dari berbagai pihak, yang terutama dari pemerintah pusat (kementerian), pemerintah provinsi, atau lembaga lainnya terkait dengan suatu kegiatan atau program khusus. Tidak setiap desa mendapatkan dana hibah ini, tergantung dari upaya setiap desa untuk mendapatkannya. Adapun untuk pendapatan asli desa yang bersumber dari pengelolaan potensi desa, rata-rata masih sangat kecil dibandingkan dengan sumber lainnya. PADes biasanya diperoleh dari pengelolaan aset atau sumber daya desa secara mandiri, baik dari produksi, jasa sewa, jual beli, atau bagi hasil keuntungan.

Kondisi tersebut menggambarkan ketergantungan desa terhadap sumber pendanaan dari luar, sehingga di dalam penggunaannya pun mengikuti ketentuan pemberi dana. Padahal berdasarkan penelitian (Yudhartha & Winaya, 2018) menekankan perlunya APBDes didasarkan pada kinerja dan mencerminkan tujuan pembangunan desa. Disisi lain PADes masih terlalu kecil sedangkan desa memiliki berbagai aset dan potensi yang semestinya bisa dikelola dengan lebih baik. Dengan demikian kondisi sebagian besar desa saat ini belum mandiri baik secara ekonomi dan administrasi dilihat dari struktur dan komposisi APBDesa, keleluasaan desa dalam mengelola pendapatan desa, aset dan usaha desa, serta kemandirian ekonomi masyarakat dalam pembangunan atau keswadayaan (Suharto, 2012).

Oleh sebab itu upaya untuk memperbesar kapasitas desa di dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa melalui berbagai strategi yang produktif. Pemerintah desa membutuhkan suatu terobosan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mereka, dan juga sumber daya masyarakat atau pihak lain di desa (misalnya milik Perum Perhutani) untuk dikelola baik oleh pemerintah desa, badan usaha desa, maupun bersama masyarakat, agar menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar. Beberapa sektor unggulan yang bisa dikelola dan berhasil di beberapa daerah misalnya adalah pariwisata, pertanian, industri pengolahan dan jasa.

Berdasarkan data status desa, dapat dilihat bahwa di Jawa Tengah kini sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal, dan menyisakan sedikit desa tertinggal. Sebagian besar desa dalam status berkembang, maju, bahkan mandiri. Jumlah desa maju dan mandiri meningkat, disisi lain jumlah desa berkembang dan tertinggal semakin menurun. Berdasarkan data survei penelitian ini juga dapat dilihat bahwa jumlah terbesar adalah desa berkembang, kemudian maju. Adapun desa mandiri memang masih tergolong kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak desa belum mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, terutama untuk kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa memiliki beberapa peran di dalam rangka meningkatkan pembangunan desa tersebut melalui beberapa indikator yang bisa diintervensi langsung oleh pemerintah desa. Dana Desa,

Alokasi Dana desa, dan hibah bertujuan agar pemerintah desa memiliki kapasitas yang lebih baik untuk meningkatkan fungsi atau kinerja pemerintah desa. Kemampuan pemerintah desa membaca peluang tersebut dapat dilihat dari kebijakan alokasi anggaran dan kegiatan yang mereka lakukan.

Berdasarkan data survei, hampir di semua desa komposisi belanja terbesar adalah untuk infrastruktur, kemudian untuk belanja rutin kantor, belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya, sementara pemberdayaan dan investasi hanya menjadi bagian kecil. Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan di perdesaan masih fokus pada upaya peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana. Pembangunan lebih dimaknai secara fisik sebagai aktivitas mendirikan bangunan atau memperbaiki sarana dan infrastruktur publik.

Dana terbesar lainnya digunakan untuk operasional kantor, dimana hal tersebut bersifat administratif dan rutinitas. Pemerintah desa menggunakan lebih banyak dana untuk operasional dibanding alokasi untuk pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial atau investasi. Beberapa upaya inovasi untuk efisiensi penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan untuk mengurangi biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun dana bantuan sosial dialokasikan berdasarkan situasi tertentu. Sebagai contoh dalam masa pandemi Covid-19, dana bantuan sosial meningkat tajam dikarenakan arahan kebijakan pemerintah dalam penggunaan dana desa untuk bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19. Dana bantuan dialokasikan dalam bentuk bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai. Besaran alokasi dana bantuan sosial ini tergantung dari situasi tertentu.

Di sisi lain upaya pembangunan kapasitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan belum banyak mendapatkan perhatian. Belum banyak pemerintah desa mengalokasikan dana yang cukup untuk pemberdayaan masyarakat, terutama peningkatan kapasitas masyarakat desa. Hal ini menunjukkan daya saing masyarakat desa belum menjadi perhatian sehingga belum mampu melakukan lompatan atau mendorong kemajuan desa itu sendiri.

Pembangunan kapasitas ekonomi desa juga masih belum terlalu diperhatikan. Belanja investasi untuk pengembangan ekonomi lokal maupun peningkatan pendapatan desa masih belum begitu banyak dilakukan oleh pemerintah desa. Belanja investasi merupakan belanja terkecil, dan bahkan sebagian daerah memilih tidak mengalokasikan belanja investasi. Dengan demikian, belum ada upaya serius bagi desa-desa untuk menuju kemandirian secara finansial, atau setidaknya mendorong perekonomian masyarakat lebih dinamis. Pemerintah desa masih mengandalkan sumber keuangan dari anggaran pemerintah, disisi lain belum ada skema untuk menciptakan kemandirian finansial antara lain melalui investasi untuk peningkatan pendapatan pemerintah desa. Investasi juga belum menjadi instrumen penting untuk meningkatkan perekonomian desa atau pendapatan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan kondisi infrastruktur dan sarana publik secara umum, alokasi belanja di desa sampel penelitian ini menunjukkan bahwa desa-desa dengan kondisi infrastruktur baik, cenderung mengalokasikan belanja infrastruktur lebih banyak dibanding dengan desa yang kondisi infrastrukturnya kurang baik. Di desa dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas publik yang terbilang buruk, belanja infrastrukturnya terbilang kecil atau sangat kecil. Begitu juga untuk belanja pemberdayaan dan investasi juga terbilang sangat kecil. Belanja bantuan sosial sedikit lebih baik dimana komposisi belanja bantuan sosial terhadap total belanja lebih tinggi.

Pada aspek sasaran pengembangan ekonomi lokal, sebagian besar desa memiliki produk unggulan atau potensi tertentu yang menjadi sumber pendapatan masyarakatnya. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, tidak semua desa berupaya mengembangkan produk unggulan tersebut. Terdapat hampir 40 persen desa yang tidak melakukan upaya khusus pengembangan atau mendukung pengembangan produk lokal tersebut. Justru sebaliknya, mengalokasikan sumber daya desa untuk pengembangan unit usaha atau produk berdasarkan trend yang sedang berkembang dan mudah dikerjakan. Dalam beberapa tahun terakhir trend pengembangan pariwisata atau pengelolaan wisata meningkat, kemudian usaha jasa dan sewa, serta industri mikro/kecil. Di sisi lain juga muncul trend pengelolaan pasar *online*.

Dengan demikian, fokus pengembangan ekonomi desa oleh sebagian besar pemerintah desa lebih bersifat ekonomi “pinggiran” bukan merupakan sektor utama di desa tersebut. Hal ini terkait dengan resiko dan potensi konflik dengan pihak lain yang terlebih dahulu menjadi ”pemain” dalam usaha tersebut. Pemerintah desa memutuskan untuk mengambil resiko terkecil dari usaha yang dijalankan, begitu juga dengan alokasi sumber daya yang digunakan juga cukup kecil untuk meminimalisir resiko. Kebanyakan desa memilih unit usaha yang relatif aman meskipun hasilnya sangat kecil. Dengan demikian upaya pengembangan usaha baru tersebut belum berkontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan asli desa maupun pendapatan masyarakat desa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Eko (2004) bahwa banyak program pembangunan desa yang dimaksudkan untuk mengangkat derajat hidup orang desa, namun justru dapat mendatangkan kerugian bagi desa, karena sekedar sebagai komoditas proyek semata. Selain itu, banyak juga program insentif yang tidak membuat petani menjadi mandiri, namun justru semakin tergantung dan pragmatis (Winarno, 2008). Penyebab kegagalan program pembangunan desa dikarenakan model *topdown* yang mengandalkan birokrasi, kurangnya komitmen pemerintah, serta hanya mengutamakan stabilitas dan fokus pada pertumbuhan (Winarno, 2008).

4. KESIMPULAN

Kapasitas pembangunan desa yang dilihat dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan finansial belum dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa dimaknai secara fisik sebagai aktivitas mendirikan bangunan atau memperbaiki sarana dan infrastruktur publik. Komposisi belanja terbesar adalah untuk infrastruktur, kemudian untuk belanja rutin kantor, belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya, sedangkan belanja pemberdayaan dan investasi sangat kecil.

Sumber daya manusia desa terkendala kapasitas, baik kualifikasi maupun kompetensi cukup rendah. Keterbatasan lapangan pekerjaan mendorong SDM yang berkapasitas mencari pekerjaan di kota. Banyak orang menginginkan tetap tinggal di desa namun lapangan pekerjaan tidak memenuhi harapan mereka. Sumber daya ekonomi unggulan belum dikelola dengan optimal. Sebagai contoh desa dengan sektor pertanian dalam arti luas dan industri olahan hasil pertanian/pangan justru sebagian besar penduduk memilih usaha di sektor perdagangan dan jasa, termasuk buruh. Infrastruktur fisik terutama jaringan jalan dan jembatan menjadi perhatian utama pembangunan perdesaan. Disisi lain sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Dari aspek finansial, pemerintah desa mengalami ketergantungan tinggi terhadap dana pemerintah. Sumber dana pembangunan terbesar adalah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta sebagian dari dana hibah. Pendapatan Asli Desa sangat kecil bahkan ada desa yang tidak memilikinya. Pada akhirnya arah pembangunan menyesuaikan ketentuan sumber pendanaan tersebut.

Upaya pembangunan kapasitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan belum banyak mendapatkan perhatian. Pembangunan kapasitas ekonomi desa juga masih belum optimal, dimana belanja investasi untuk pengembangan ekonomi lokal maupun peningkatan pendapatan desa masih minim. Tidak semua desa berupaya mengembangkan produk unggulan mereka, sebaliknya mengalokasikan sumber daya desa untuk pengembangan unit usaha atau produk yang tidak strategis. Fokus pengembangan ekonomi desa lebih bersifat ekonomi “pinggiran” bukan merupakan sektor utama di desa tersebut.

Dapat diusulkan beberapa rekomendasi terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, sumber daya ekonomi, dan kemandirian fiskal. Transformasi sosial dan ekonomi saat ini sangat dibutuhkan untuk mengangkat kemandirian desa. Desa memerlukan beberapa terobosan dan inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih baik, meningkatkan kualitas SDM dan kesempatan kerja yang lebih menarik di desa. Penguatan sumber daya manusia dan sektor unggulan desa semestinya menjadi salah satu prioritas pembangunan desa.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki skema pengelolaan keuangan desa agar lebih fokus pada upaya menciptakan terobosan baru tersebut. Desa memerlukan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai terobosan baru dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Perlu strategi memperbesar kapasitas fiskal desa dengan menghasilkan Pendapatan Asli Desa melalui berbagai strategi yang produktif. Pemerintah desa masih mengandalkan sumber keuangan dari pemerintah, belum ada skema untuk menciptakan kemandirian.

Secara akademis, penelitian ini menyarankan studi lanjut untuk melakukan evaluasi posisi desa pada saat ini dalam konteks pemerintahan dan administrasi, sosial, politik, dan ekonomi untuk memberikan kontribusi pada penatan regulasi dan kebijakan terhadap desa. Kajian lain diperlukan untuk mendalami aspek sosiologis, geografis, dan demografis perdesaan terkait dengan fenomena jaringan ekonomi, migrasi, dan interaksi antar desa.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian dan penyusunan artikel ini. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian “Strategi Penumbuhan Kawasan Perdesaan Pasca Covid 19 di Jawa Tengah” yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 bersumber dari pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah. Terimakasih kami sampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, para kolega peneliti di Bappeda Provinsi Jawa Tengah, serta pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian ini.

6. REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2022). *Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah September 2021* (Vol. 06, Issue 01).
- Bintarto, R. (1984). *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bire, C. M. D., Nubatonis, O. J., Tallo, D. D., Jacob, Y. M. Y., Ermalinda, J., & Dollu, D. Y. (2024). Penyuluhan Hukum Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 701–707. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1447>.
- Dahlan, I. W., Parawangi, A., & Muhiddin, A. (2012). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 43–57. <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.37>.
- Daldjoeni, N., & Suyitno, A. (2004). *Pedesaan, lingkungan dan pembangunan*. Alumni.
- Eko, S. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD Press.
- Hermanto, N. (2018). Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan: Pengembangan SDM, Penguatan Usaha, dan Inovasi Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35(2), 139. <https://doi.org/10.21082/fae.v35n2.2017.139-150>
- Hidayah, A. M. (2022). Analisis Analisis Potensi dan Tantangan Pengembangan Produk Unggulan Desa. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 16–30. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.611>.
- Husaeni, U. A. (2017). Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi di Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur). *Journal of Empowerment*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.35194/je.v1i1.16>.
- Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi Perdesaan*. Pustaka Setia.
- Jang, E., & Park, D. B. (2022). Factors Influencing the Community Capacity of Rural Residents in South Korea. *Rural Society*, 31(2), 87–100. <https://doi.org/10.1080/10371656.2022.2083856>.
- Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 1-8.
- Lanak, B. (2021). Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 16-24.
- Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean. *JIANE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(April), 56–72.
- Marsidi, M. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 6(4), 14. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v6i4.237>.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press
- Nurcholis, H. (2014). Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Palsu dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. *Jurnal Politica*, 5(1), 1–19.
- Nuradhawati, R. (2020). Peningkatan Kapasitas SDM di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Era 4.0. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 1(2). <https://doi.org/10.26874/jakw.v1i2.70>
- Pivovar, P. V., & Pivovar, A. M. (2023). Theoretical and Methodological Basis of Formation and Use of the Resource Potential Of Rural Areas. *Agrosvit*, 11, 11–17. <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.11.11>.
- Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (2015). Peran Pemerintah Masyarakat dalam Pembangunan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3, 1–116.
- Purnomo, A. M., Satria, A., & Rustiadi, E. (2011). *Menuju Desa 2030*. Crescent Press.
- Putranto, J.H & Kusumaningtyas, M. (2024). Local Creativity and Economic Growth: Creative Economic Potential in Developing Village Tourism Area. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 21(1), 2830–2838. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.1.0298>.
- Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintah Desa Dalam. *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, 1(1), 106–120.
- Rustiadi, E., & Pranoto. (2007). *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan*. Crescent Press.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Dyah R Panuju. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sahyana, Y. (2019). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 157–181. <https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.618>.
- Sani, K. R., & Mursak. (2018). *Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sinjai*. 9(2), 101–114.
- Santoso, P. (2006). *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. 2006.
- Scoones, I. (1998). Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis. *IDS Working Paper 72*.
- Shtuler, I., & Serzhanov, V. (2022). State and Regional Investment in the Development of Rural Areas (Infrastructural Aspect). *Actual Problems of Economics*, 1(255), 81–88. <https://doi.org/10.32752/1993-6788-2022-1-255-81-88>.
- Soka, A. B. R., Sasongko, T., & Setyawan, D. (2012). *Strategi Pendapatan Masyarakat Melalui Sektor Home Industry*. 1(1), 27–39.
- Sugiono, S., N. Cahyawati, A., & E. Swara, S. (2020). Village Potential Mapping Based on Development Village Index (DVI). *International Journal of Social and Local Economic Governance*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2020.006.01.1>.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Suharto, D. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 153–160. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.153-160>.
- Suharyanto, & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 4(4), 251–260. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21787/jbp.4.2012.251-260>.
- Sulasdiono, A., & Kartika, R. S. (2021). Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 105–114. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.141>.
- Tajuddin, S., Ikbal, M., & Sulfikar, S. (2020). Fungsi Pemerintahan Desa Terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitue Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 16-20.
- Tarigan, R. (2008). *Perencanaan Pembangunan Wilayah; Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Usman, S., & Habib, A. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Satu Desa Satu Milliar Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Studi Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan dan Desa Bere-Bere Kec. Morotai Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 352–376.
- Winarno, B. (2008). *Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia*. Tiara Wacana.
- Yudhartha, P. D., & Winaya, I. K. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1470>.